LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM

PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

PEMBIMBING :

Dra. Teta Riasih, MP

Oleh :

Joan Christian Situmorang

NRP. 2003112

POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL

BANDUNG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul	:	LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL DI KELURAHAN RANCANUMPANG
Nama Mahasiswa	:	Joan Christian Situmorang
NRP	:	2003112
Program	:	Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan

Pembimbing

Dra. Teta Riasih, MP

Mengetahui Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat- Nya praktikan dapat menyelesaikan kegiatan Praktikum Laboratorium dan penulisan laporan akhir Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungandan Pemberdayaan Sosial. Laporan Praktikum Laboratorium disusun berdasarkan dari hasil kegiatan analisis yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari hingga 15 April 2023.

Laporan ini berisi analisis dan rencana intervensi terhadap masalah yang terdapat dalam lima profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, yaitu Profil Analis Jaminan Sosial, Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Profil Analis Pemberdayaan Sosial, Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Profil Analis Penanggulangan Bencana. Praktikan menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini dapat selesai berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini praktikan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Marjuki, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
2. Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
4. Dra. Teta Riasih, MP selaku dosen pembimbing Praktikum Laboratorium yang telah memberikan bimbingan dan arahannya kepada Praktikan.
5. Bapak Sapaat, S.Sos., M.AP selaku Lurah Rancanumpang Kecamatan Gedebage atas sambutan, bantuan, serta arahannya selama praktikum dilaksanakan
6. Teman-teman kelompok 7 Praktikum Laboratorium

Praktikan menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu praktikan mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangunterhadap laporan Praktikum Laboratorium ini.

Bandung, 15 April 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR MATRIKS ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan dan Manfaat Praktikum 2

C. Waktu dan Lokasi Praktikum 4

D. Proses Praktikum 4

E. Sistematika Laporan 10

BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM **11**

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI **85**

A. Kesimpulan 85

B. Rekomendasi 87

DAFTAR PUSTAKA **88**

LAMPIRAN **90**

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 2. 1 Bentuk Kegiatan dan Program Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.....20

Tabel 2. 2 Sistem Partisipan Sosialisasi dan Pendampingan.....22

Tabel 2. 3 Tabel Rencana Anggaran Biaya Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.....24

Tabel 2. 4 Tahapan pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.....27

Tabel 2. 5 Sistem Partisipan "Sosialisasi dan Pendampingan KPM dalam pemanfaatan dana BPNT".....37

Tabel 2. 6 Rencana Anggaran Biaya Program "Sosialisasi dan Pendampingan KPM dalam pemanfaatan dana BPNT".....38

Tabel 2. 7 Tahapan Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan pendampingan KPM dalam pemanfaatan Dana BPNT.....41

Tabel 2. 8 Sistem Partisipan "Program Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia Dalam Menangani Lansia Penyandang Disabilitas".....52

Tabel 2. 9 Rencana Anggaran Biaya Program Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia Dalam Menangani Lansia Penyandang Disabilitas.....54

Tabel 2. 10 Tahapan Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia Dalam Menangani Lansia Penyandang Disabilitas....56

Tabel 2. 11 Sistem Partisipan Program Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Hasil Limbah Cair Rumah Tangga Di Masyarakat Kelurahan Rancanumpang.....67

Tabel 2. 12 Rencana Anggaran Biaya Program Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Hasil Limbah Cair Rumah Tangga Di Masyarakat Kelurahan Rancanumpang.....69
Tabel 2. 13 Tahapan Pelaksanaan Program Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Hasil Limbah Cair Rumah Tangga Di Masyarakat Kelurahan Rancanumpang.....72
Tabel 2. 14 Sistem Partisipan Program Penguatan Kapasitas Anggota Tagana Dalam Kesiapsiagaan Dan Penanggulangan Bencana Di Kelurahan Rancanumpang.....80
Tabel 2. 15 Rencana Anggaran Biaya Program Penguatan Kapasitas Anggota.....82
Tabel 2. 16 Tahapan Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Anggota Tagana...85

DAFTAR MATRIKS

Hal

Matriks 2. 1 Analisis SWOT Program “Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Programming BPJS Ketenagakerjaan".....25

Matriks 2. 2 Analisis SWOT Program Sosialisasi dan pendampingan KPM dalam pemanfaatan Dana BPNT.....39

Matriks 2.3 Analisis SWOT Program Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia Dalam Menangani Lansia Penyandang Disabilitas.....54

Matriks 2. 4 Analisis SWOT Program Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Hasil Limbah Cair Rumah Tangga Di Masyarakat Kelurahan Rancanumpang.....70

Matriks 2. 5 Analisis SWOT Program Penguatan Kapasitas Anggota Tagana.....83

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.1 Dokumentasi Pembekalan Pra Lapangan.....5

Gambar 1. 2 Bimbingan dengan Dosen Pembimbing.....6

Gambar 1. 3 Kegiatan Community Meeting bersama warga RW 01 Kelurahan Rancanumpang.....7

Gambar 1. 4 Wawancara dengan Bapak Ramram Mansur Pendamping PKH Kelurahan Rancanumpang.....8

Gambar 1. 5 Wawancara dengan Bu Ayi Pedagang makanan reginang dan regining...8

Gambar 1. 6 Wawancara dengan Ibu Ayi Ibu PKK RW 01 Kelurahan Rancanumpang.....9

Gambar 2.1 Analisis Pohon Masalah Isu Jaminan Sosial.....16

Gambar 2. 2 Analisis Pohon Masalah Isu Sumber Dana Bantuan Sosial.....33

Gambar 2. 3 Analisis Pohon Masalah Isu Pemberdayaan Sosial.....49

Gambar 2. 4 Analisis Pohon Masalah Isu Penataan Lingkungan Sosial.....64

Gambar 2. 5 Analisis Pohon Masalah Isu Penanggulangan Bencana.....78

DAFTAR LAMPIRAN

Hal

Lampiran 1 Resume pembekalan profil analis jaminan sosial……...…90

Lampiran 2 Resume pembekalan profil sumber dana bantuan sosial……...…….92

Lampiran 3 Resume pembekalan profil pemberdayaan sosial……..…...….….94

Lampiran 4 Resume pembekalan profil penataan lingkungan sosial……...……. 96

Lampiran 5 Resume pembekalan profil penanggulangan bencana…….…...……98

Lampiran 6 Data Pekerjaan Masyarakat Kelurahan Rancanumpang.....100

Lampiran 7 Data Penyandang Disabilitas Kelurahan Rancanumpang.....101

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program studi perlindungan dan pemberdayaan merupakan program studi yang berdiri pada tanggal 09 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 436/KPT/I/2018, sebagai salah satu syarat untuk pengajuan perubahan kelembagaan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial, yang kemudian diresmikan pada bulan Juli 2019. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan, dan/atau kompetensi dalam bidang keilmuan pekerjaan sosial generalis serta mampu mempraktekkannya secara profesional dalam bidang perlindungan dan pemberdayaan sosial.

Profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Dihasilkan Untuk memiliki keunggulan meliputi aspek kemampuan kerja, kemampuan manajerial, penguasaan pengetahuan dan tanggung jawab, yaitu:

1. Analis Jaminan Sosial

Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji implementasi, mendesain program, mengaplikasikan sistem dan menyelesaikan masalah dalam sistem jaminan sosial dalam perlindungan sosial

2. Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan, mendesain rencana pelaksanaan model, mengaplikasikan berbagai model dan menyelesaikan masalah dalam implementasi sumber dana bantuan sosial.

3. Analis Pemberdayaan Sosial

Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan, mendesain rencana, mengaplikasikan berbagai model dan menyelesaikan masalah dalam pemberdayaan sosial.

4. Analis Penataan Lingkungan Sosial

Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan, mendesain rencana, dan menyelesaikan masalah dalam penataan lingkungan sosial.

5. Analis Penanggulangan Bencana

Yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengkaji berbagai permasalahan, mendesain rencana, dan menyelesaikan masalah dalam penanggulangan bencana

Untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa Program Studi Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial, diperlukan pengetahuan, keterampilan, dan nilai pekerjaan sosial. Hal ini diaplikasikan pada Praktikum Laboratorium yang menjadi bagian penting dalam membentuk profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan keterampilan praktik intervensi pekerjaan sosial mulai proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam laboratorium Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial Praktikum Laboratorium dilaksanakan dalam laboratorium *indoor* dan *outdoor* secara luring untuk dapat memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat

B. Tujuan dan Manfaat Praktikum

1. Tujuan Praktikum

Tujuan dilakukannya praktikum laboratorium bagi mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial memiliki

1. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
3. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
4. Kemampuan untuk mempraktikan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
5. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :

a. Pendekatan Awal
b. Asesmen
c. Perencanaan Intervensi

2. Manfaat Praktikum

A. Bagi Mahasiswa

1. Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
2. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
3. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
4. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan-keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
5. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
6. Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan :

a. Pendekatan awal

b. Asesmen
c. Rencana Intervensi

B. Bagi Lembaga

1. Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
2. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

C. Waktu dan Lokasi Praktikum

Praktikum yang praktikan laksanakan berlokasi di Kelurahan Rancanumpang . Kelurahan Rancanumpang merupakan salah satu Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Gedebage Kota Bandung Jawa Barat. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :

1. Pra Lapangan
   a. Pembekalan : 25 Januari – 3 Februari 2023
   b. Pelepasan Praktikan : 3 Februari 2023
2. Lapangan (Indoor) : 6 Februari - 15 April 2023
3. Pasca Lapangan :
   a. Bimbingan penulisan laporan : 16 - 26 April 2023
   b. Pendaftaran ujian : 27 – 29 April 2023
   c. Ujian Lisan Praktikum : 1-2 Mei 2023
   d. Perbaikan dan penyerahan Laporan : 3 – 10 Mei 2023

D. Proses Praktikum

Praktikum laboratorium dilaksanakan selama kurang lebih 10 minggu yang mana setiap profil dimulai dari Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penata Lingkungan Sosial sampai dengan Analis Penanggulangan Bencana dilaksanakan masing-masing selama 2 minggu dan satu hari sebelum turun ke lapangan, praktikan diberikan materi dan pembekalan mengenai masing-masing profil. Praktikum dilaksanakan di lokasi masing-masing yang sudah dipilih oleh praktikan, praktikan melakukan tahap inisiasi sosial sampai dengan tahap penyusunan rencana intervensi dengan

teknologi yang sudah dipelajari. Adapun rincian proses praktikum yang dijalani adalah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

b. Pembekalan Umum

Pembekalan Praktikum Laboratorium Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Februari 2023 pada pukul 08.30-11.30 WIB secara Luring di Auditorium Poltekesos Bandung. Pembekalan ini dihadiri oleh Mahasiswa Praktikan Program Studi Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial Semester VI, Ibu Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Kepala Prodi D-IV Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Ibu Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Ketua Laboratorium Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, serta Para Dosen Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Agenda kegiatan pembekalan praktikum ini yaitu menjelaskan mengenai isi pedoman praktikum laboratotium.

Gambar 1.1 Dokumentasi Pembekalan Pra Lapangan

c. Bimbingan pra lapangan oleh dosen pembimbing praktikum:

1) Pada pertemuan pertama, dilakukan perkenalan terlebih dahulu, pembahasan pedoman praktikum dan jadwal pelaksanaan praktikum

2) Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan melalui Google Classroom
3) Membuat skenario dan timeline Praktikum.

Gambar 1. 2 Bimbingan dengan Dosen Pembimbing

1. **Tahap Lapangan**

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial
   1) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh praktisi/pakar Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola pelaksanaan sistem jaminan sosial
   2) Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Jaminan Sosial
   3) Praktik Analis Jaminan Sosial, meliputi:
      a. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial
      b. Melakukan Asesmen
      c. Menyusun Rencana Intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan
      d. Menyusun laporan praktik analis jaminan sosial

Gambar 1. 3 Kegiatan Community Meeting bersama warga RW 01 Kelurahan Rancanumpang

b. Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola sumber dana bantuan sosial yang meliputi:

a) Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial,
b) Modelsumber dana bantuan sosial,yang digunakan
c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial,
d) Merancang program sumber dana bantuan sosial,
e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan sosial,
f) Stakeholder terkait program sumber dana bantuan sosial

Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial,meliputi:

a. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial
b. Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial,
c. Model sumber dana bantuan sosial,yang digunakan
d. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial
e. Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
f. Menyusun Rencana Intervensi
g. Menyusun laporan praktik analis sumber dana bantuan sosial
h. Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan sosial

Gambar 1. 4 wawancara dengan Bapak Ramram Mansur Pendamping PKH Kelurahan Rancanumpang

c. Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial
   1. Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial oleh praktisi/industri, Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Pemberdayaan Sosial
   2. Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Pemberdayaan Sosial
   3. Praktik Analis Pemberdayaan Sosial, meliputi:
      a. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial
      b. Melakukan Asesmen, dengan menggunakan data sekunder
      c. Menyusun Rencana Intervensi
      d. Menyusun laporan praktik analis pemberdayaan social

Gambar 1. 5 Wawancara dengan Bu Ayi Pedagang makanan reginang dan regining

d. Peningkatan Kompetensi Analis Penataan Lingkungan Sosial

1. Peningkatan Kompetensi Analis Penata Lingkungan Sosial oleh praktisi/industri Membahas tentang pengalaman praktisi dalam mengelola Penataan Lingkungan Sosial
2. Peningkatan Kompetensi Analis penataan lingkungan sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Penataan Lingkungan Sosial
3. Praktik Analis Penataan Lingkungan Sosial, meliputi:
   a. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penataan lingkungan sosial
   b. Assesmen dengan menggunakan data sekunder
      (1) Menyusun Rencana Intervensi
      (2) Menyusun laporan praktik Analis Penataan Lingkungan Sosial

Gambar 1. 6 Wawancara dengan Ibu Ayi Ibu PKK RW 01 Kelurahan Rancanumpang

e. Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana

1. Peningkatan Analis Penanggulangan Bencana oleh praktisi/industry, Membahas tentang pengalaman praktisi dalam penanggulangan bencana
2. mengacu pada kompetensi Profil Analis Penanggulangan Bencana
3. Praktik Analis Penanggulangan Bencana, meliputi:
   a). Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penanggulangan bencana
   b). Melakukan Assesmen, dengan menggunakan data sekunder

1. Menyusun Rencana Intervensi
2. Menyusun laporan praktik penanggulangan bencana
3. Pasca Lapangan

Gambar 1 01 Wawancara dengan Ibu Susi Ketua RW 01 Kelurahan Rancanumpang

E. Sistematika Laporan

Laporan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, sasaran kegiatan praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum dan sistematika laporan.

BAB II KAJIAN LITERATUR, yang berisi tentang Profil Analis Jaminan Sosial, Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Profil Analis Pemberdayaan Sosial, Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Profil Analis Penanggulangan Bencana. Masing-masing profil membahas mengenai gambaran umum masalah, tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih, asesmen, dan rencana intervensi.

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, yang berisi kesimpulan hasil praktikum dan rekomenddasi yang ditujukan kepada Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

BAB II
PRAKTIKUM LABORATORIUM

A. Profil Analis Jaminan Sosial

PENINGKATAN KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN PADA PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI KELURAHAN RANCANUMPANG

1) Gambaran Umum Masalah

Kelurahan Rancanumpang adalah salah satu wilayah di Kecamatan Gedebage Kota Bandung, yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor informal yaitu tani, buruh, pedagang, dan sebagainya. Namun hampir semua dari mereka tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan karena belum pernah ada sosialisasi serta ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Padahal bukan hanya para pekerja formal saja yang harus tercakup dalam BPJS Ketenagakerjaan, tetapi para pekerja informal juga perlu berupa jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Masyarakat yang bekerja sebagai petani, pedagang, dan sebagainya merasa bahwa BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk pekerja yang bekerja di pabrik serta perusahaan, mereka juga tidak terlalu mengetahui bagaimana skema BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya mereka ikuti. Padahal jika mereka tidak mengikuti jaminan pensiun, maka mereka tidak akan mendapatkan penghasilan lagi ketika usia mereka sudah tua dan tak mampu bekerja, lalu jika mereka tidak mengikuti jaminan kematian, maka tidak ada jaminan terhadap keluarga yang ditinggalkan, apalagi jika anaknya termasuk kedalam usia sekolah maka anaknya tidak mendapatkan jaminan pendidikan berupa beasiswa yang mana hal ini akan didapatkan ketika mereka merupakan peserta dari BPJS Ketenagakerjaan khususnya pada program jaminan kematian.

Jika hal ini terus terjadi, keterpaparan pekerja sektor informal terhadap resiko-resiko tertentu akan meningkat dan bukan hanya merugikan pekerja itu saja, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan keluarganya dan kualitas kehidupannya. Maka dari itu praktikan tertarik untuk mengkaji tentang jaminan ketenagakerjaan di Kelurahan Rancanumpang dengan harapan partisipasi masyarakat untuk program ini akan meningkat sehingga dapat mengurangi kerentanan apabila sudah memasuki masa pensiun maupun meninggal dunia.

2) **Tinjauan Konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih**

a. Kajian Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Kepesertaan jaminan sosial bersifat wajib dan diselenggarakan oleh pemerintah melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 dengan berlandaskan UUD 1945 dan dalamnya menyatakan bahwa Pemerintah harus terlibat dalam mensejahterakan warga negaranya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ayat 1 menyatakan "Jaminan Sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak".

Jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, serta jaminan hari tua. Sistem jaminan sosial nasional ini dilakukan berdasarkan dengan 3 asas yakni kemanusiaan (menjunjung tinggi harga diri manusia), manfaat (pemberian kebutuhan dasar hidup yang layak), serta keadilan (semua kalangan mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh jaminan sosial) dan berdasarkan 9 prinsip yaitu kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Jaminan sosial bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi setiap peserta program dan anggota keluarganya, dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak. Pelaksanaan SJSN merupakan kewajiban negara, sekaligus kewajiban penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial. Penyelenggaraan SJSN berdasarkan mekanisme asuransi sosial dan kepesertaan yang bersifat wajib.

b. Kajian BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan.

Jenis-jenis anggota BPJS Ketenagakerjaan terbagi menjadi 4, yaitu :

1. Jasa Konstruksi yaitu pekerja yang bekerja di sebuah penyedia layanan berupa konsultasi atas berbagai tahapan pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah konstruksi.
2. Penerima Upah (PU) yaitu pekerja yang melakukan pekerjaan kemudian mendapatkan imbalan dari pihak pemberi kerja. Imbalan tersebut dapat berupa upah, gaji, maupun jenis imbalan yang lain.
3. Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu orang yang memperoleh pendapatan bersumber dari bisnis yang dijalankan sendiri. Beberapa pekerjaan yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya dokter, tukang ojek, pedagang keliling, pengacara, dan lainnya.
4. Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu seorang WNI yang melakukan sebuah pekerjaan di luar negeri, baik akan, sedang, maupun sudah selesai melakukan pekerjaan tersebut.

Terdapat 4 program dalam BPJS Ketenagakerjaan yaitu program jaminan hari tua (JHT) yang akan diberikan ketika berusia 56 tahun berdasarkan kontribusi premi, program jaminan pensiun (JP) yang akan diberikan ketika mengalami pensiun baik itu karena cacat, usia, meninggal, maupun mutasi tetap ke luar negeri.

Lalu ada program jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang diberikan dalam rangka melindungi tenaga kerja dari kemungkinan risiko pekerjaan berupa kecelakaan kerja. Kemudian ada program jaminan kematian (JKM) yang akan diberikan ketika peserta meninggal dunia dan akan diberikan kepada ahli waris.

c. Kajian Pekerja Sektor Informal

Pekerja sektor informal menurut UU Ketenagakerjaan merupakan orang yang bekerja tanpa relasi kerja, artinya tidak ada perjanjian yang mengatur elemen-elemen kerja, upah dan kekuasaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara umum mendefinisikan sektor informal sebagai aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar, yang tidak memiliki struktur organisasi formal. Contoh dari pekerja sektor informal yaitu petani, pedagang kaki lima, dan sebagainya

Dalam jurnal Analisa Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sektor Formal dan Sektor Informal di Jawa Timur (2014) karya Yupi Kurniawan Sutopo dan R.R. Retno Ardianti, ekonomi sektor informal memiliki delapan ciri utama, yaitu:

a. Kegiatan usahanya tidak terorganisasi dengan baik.

b. Karena kelompok usahanya tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang berbentuk formal, biasanya kelompok usaha yang tergolong dalam sektor informal, tidak memiliki izin resmi.
c. Pola kegiatan usahanya tidak teratur dengan baik. Mulai dari lokasi hingga jam kerjanya.
d. Unit usaha yang dilakukan sering berganti dari satu sub sektor ke sub sektor lainnya.
e. Umumnya teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi masih bersifat tradisional atau sederhana.
f. Skala operasi kegiatan sektor informal tergolong kecil karena modal dan perputaran usahanya cenderung minim.
g. Tidak memerlukan pendidikan formal untuk menjalankan kegiatan usahanya karena sebagian besar pengetahuannya diperoleh dari pengalaman saat bekerja.
h. Modalnya berasal dari tabungan atau lembaga keuangan tidak resmi.

3) Asesmen

a) Identifikasi Masalah

Berdasarkan Dari hasil *Community Meeting dan* wawancara tersebut, didapatkan bahwa masalah terkait analis jaminan sosial adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terkait pentingnya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan
2. Belum adanya sosialisasi mengenai Program BPJS Ketenagakerjaan
3. Kurangnya Angka Partisipasi BPJS Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal

Mayoritas masyarakat di Kelurahan Rancanumpang bekerja di sektor informal dan hampir semuanya tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan karena mereka tidak mengetahui apa saja manfaat yang akan mereka peroleh ketika mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam Program Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Hal ini juga disebabkan belum ada sosialisasi tentang BPJS di Kelurahan Rancanumpang dalam 5 tahun terakhir.

Hal ini berdasarkan hasil dari community meeting yang dilakukan bersama sebanyak 50 orang masyarakat Kelurahan Rancanumpang. Warga yang bekerja sebagai pedagang tidak mengetahui apa saja manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan bahkan tidak mengetahui apa saja program yang bisa diikuti dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal, sebagaimana UU No 40 Tahun 2004, pekerja sektor informal termasuk pada komponen bukan penerima upah yang seharusnya mengikuti program Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

1) Penyebab masalah

Penyebab permasalahan yang ada yaitu belum pernah ada sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Kelurahan Rancanumpang sehingga masyarakat kurang rencana uang tidak mengetahui Apa manfaat dan kepentingan dari program BPJS Ketenagakerjaan yang berakibat pada permasalahan kurangnya angka partisipasi pekerja sektor informal terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan.

2) Dampak Masalah

Dampak masalah yang ditimbulkan yaitu memperburuk kesejahteraan keluarga apabila kepala keluarga meninggal tanpa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada permasalahan kurangnya angka partisipasi pekerja sektor informal terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerjaan informal yang tidak mendapatkan bentuk perlindungan sosial ketenagakerjaan jadi rentan jika terjadi musibah kepada nya.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah diidentifikasikan dari hasil Community Meeting, praktikan mendapatkan isu masalah yaitu berdasarkan dari 50 warga Rancanumpang yang mengikuti community meeting, sebanyak 42 orang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Partisipan yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan didominasi oleh profesi pedagang dan buruh

Melihat pada penyebab utama yaitu belum pernah ada sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan dampak utama yang akan ditimbulkan jika masalah tidak diatasi yaitu memperburuk kesejahteraan keluarga apabila kepala keluarga meninggal tanpa kepesertaan BPJS, dapat disimpulkan bahwa fokus masalah yang dikaji yaitu terkait dengan kurangnya angka partisipasi BPJS Ketenagakerjaan pada sektor informal. Banyak dari pekerja sektor informal di Kelurahan Rancanumpang yang tidak mengetahui dan mempertimbangkan resiko sosial yang akan terjadi sehingga tidak ada langkah antisipasi. Padahal, mereka wajib mengikuti Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKM) dan sangat penting menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatan perlindungan dan jaminan apabila mereka tidak bisa bekerja lagi karena memasuki masa pensiun dan apabila mengalami kematian. Adapun fokus masalah ini dikaji melalui tools analisis pohon masalah.

4) Analisis pohon masalah

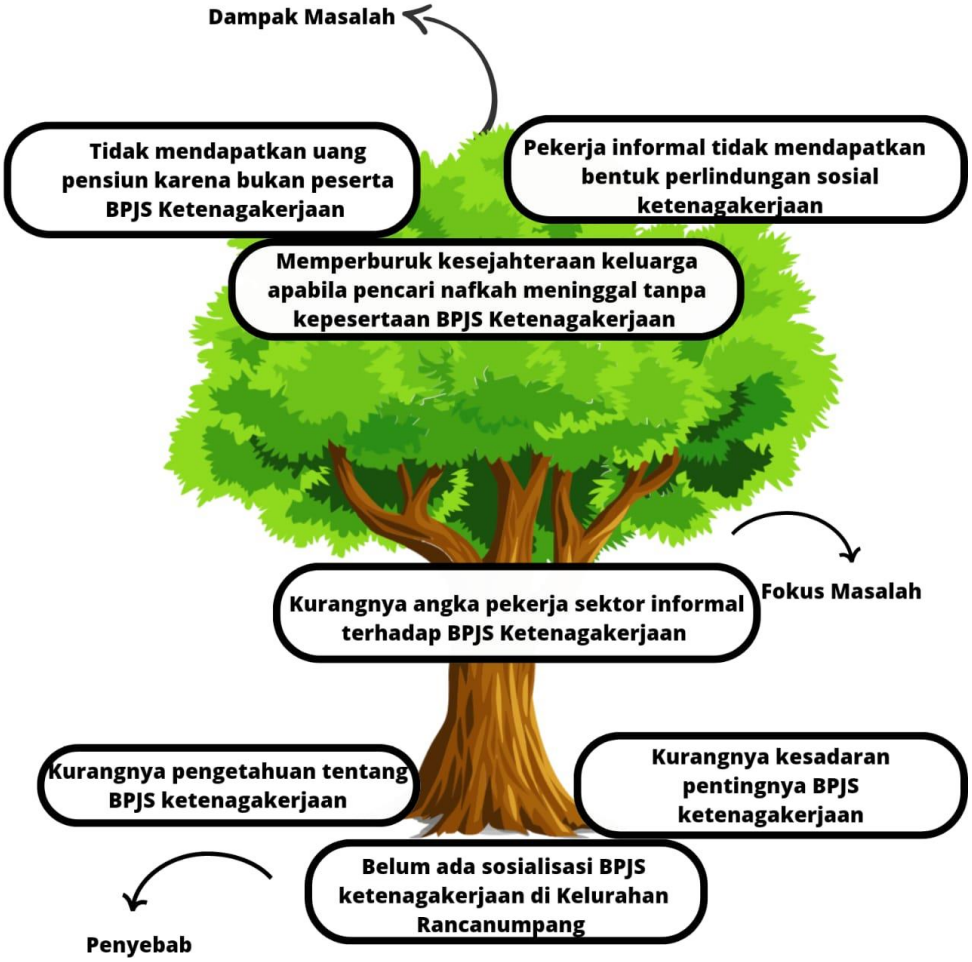

Gambar 2. 1 Analisis Pohon Masalah Isu Jaminan Sosial

Fokus masalah yang dikaji dalam pohon masalah yaitu kurangnya angka partisipasi pekerja sektor informal terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Penyebab utama masalah ini yaitu belum pernah ada sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Kelurahan Rancanumpang. Penyebab utama ini memunculkan penyebab lain yaitu kurangnya pengetahuan tentang BPJS Ketenagakerjaan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Dampak utama yang ditimbulkan yaitu memperburuk kesejahteraan keluarga apabila kepala keluarga meninggal tanpa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu hal iini didukung berdasarkan dari 50 warga Rancanumpang yang mengikuti community meeting, sebanyak 42 orang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Sebagian besar dari partisipan Community meeting yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan didominasi oleh profesi pedagang, petani, buruh dan juga ibu rumah tangga.

b) Identifikasi Kebutuhan

Melihat pada penyebab masalah yang dikaji melalui pohon masalah yang mana penyebab utama masalah ini yaitu belum pernah ada sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Kelurahan Rancanumpang lalu penyebab lain yaitu kurangnya pengetahuan tentang BPJS Ketenagakerjaan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Maka diperlukan penyuluhan dan penyadaran tentang pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan pensiun dan jaminan kematian untuk memberikan informasi betapa pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian) agar jika ada resiko sosial, maka tidak akan memperparah kondisi kesejahteraan. Selain itu, diperlukan juga simulasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara online agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran serta skema pembayarannya. Jika memang masyarakat tetap tidak mengerti dan merasa akan mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran, maka pekerja sosial memfasilitasi proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara online dan masyarakat menyiapkan dokumen yang diperlukan sehingga proses pendaftarannya bisa dibantu oleh pekerja sosial.

c) Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial asset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Alan Pincus dan Minahan (1973:4) membagi ruang lingkup sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi tiga:

1) Sumber informal

Sumber informal dapat berupa keluarga, teman, tetangga, orang lain yang bersedia membantu, dukungan emosional, kasih sayang, informasi, dan pelayanan konkrit lainnya. Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan yaitu keluarga dari pihak yang memiliki permasalahan kepesertaan.

2) Sumber formal

Sumber formal merupakan suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sumber formal yang dapat dimanfaatkan yaitu BPJS ketenagakerjaan kota Bandung berperan sebagai educator

3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan dalam program ini adalah seperti berupa rumah sakit, badan adopsi, program latihan kerja, dan pelayanan resmi.

4) **Rencana Intervensi**

a) **Latar Belakang**

Berdasarkan data yang didapatkan dari profil Kelurahan rancanumpang tahun 2021, terdapat sebanyak 182 orang yang berprofesi sebagai pedagang, sebanyak 121 orang yang berprofesi sebagai petani, dan sebanyak 1120 orang yang berprofesi sebagai kuli dan buruh.

Melihat berdasarkan data data profil Kelurahan Rancanumpang tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kelurahan rancanumpang berprofesi di sektor pekerja informal yaitu sebanyak 31,28%. Pekerja sektor informal di Kelurahan rancanumpang sebagian besar tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa perlunya suatu program untuk meningkatkan jumlah partisipasi peserta BPJS Ketenagakerjaan sektor pekerja informal di kelurahan rancanumpang.

Setiap orang berhak mendapatkan jaminan sosial, baik itu berupa jaminan kesehatan maupun jaminan ketenagakerjaan. Namun berdasarkan asesmen di Kelurahan Rancanumpang, terdapat permasalahan dimana hampir semua pekerja sektor informal tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan. Padahal, mereka sebagai komponen bukan penerima upah (BPU), seharusnya memiliki jaminan pensiun dan kematian. Hal ini disebabkan belum pernah ada sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Kelurahan Rancanumpang, kurangnya pengetahuan tentang BPJS Ketenagakerjaan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan.

Mereka tidak terlalu mengetahui bagaimana mekanisme serta skema BPJS Ketenagakerjaan, mereka juga tidak terlalu mengetahui apa saja manfaat yang akan mereka dapat ketika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal jika mereka meninggal tanpa menjadi peserta JKM, akan memperparah kondisi kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan karena tidak ada jaminan yang melindungi dan apabila kemampuan bekerja mereka menurun karena sudah memasuki masa pensiun, maka mereka tidak mendapatkan jaminan karena bukan peserta JP.

Dengan posisi yang lemah secara legalitas serta tingkat produktivitas dan upah yang relatif lebih rendah, masyarakat yang bekerja di sektor informal yang dimaksud dalam masalah ini termasuk dalam kategori kelompok rentan. Mereka juga termasuk dalam golongan warga yang kesulitan mengakses jaminan social.

Seharusnya mereka sebagai pekerja sektor informal mengikuti program seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian namun dikarenakan ketidaktahuan mereka yang mana mereka hanya

mengetahui bahwa yang wajib mengikuti hanyalah orang yang bekerja di sektor formal, maka hampir semua pekerja sektor informal di Kelurahan Rancanumpang tidak mengikuti program jaminan pensiun dan jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan adanya masalah tersebut, maka dibutuhkan program sosialisasi dan pendampingan kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan yang memanfaatkan sistem sumber informal berupa keluarga, teman, tetangga, ataupun orang yang dapat memberikan bantuan kepada para pekerja sektor informal tersebut. Lalu Sistem sumber formal berupa karang taruna, kelompok pedagang dan PKK. Kemudian sistem sumber kemasyarakatan berupa Dinas Sosial Kota Bandung , BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

Dengan rangkaian kegiatan berupa penyuluhan dan tanya jawab tentang jaminan sosial dan urgensitasnya untuk kelompok rentan khususnya pekerja sektor informal, penyuluhan dan tanya jawab tentang konsep tenaga kerja beserta dengan upaya perlindungannya, penyuluhan dan tanya jawab tentang skema pembayaran BPJS

b) Tujuan umum dan khusus

Berdasarkan dari latar belakang rencana intervensi di atas maka tujuan umum yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program "Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan"adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman kepada pekerja sektor informal yang belum tercakup BPJS Ketenagakerjaan bahwa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sangatlah penting.
2. Menumbuhkan kesadaran berbagai pihak untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

Selain tujuan umum, tujuan khusus yang ingin dicapai dalam melaksanakan program "Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan"adalah yaitu :

1. Mengantisipasi semakin rendahnya tingkat kesejahteraan keluarga ketika kepala keluarga tidak tercakup dalam BPJS Ketenagakerjaan dan terkena resiko sosial ataupun kematian.
2. Pekerja sektor informal segera mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
3. Meningkatnya angka partisipasi BPJS Ketenagakerjaan di Kelurahan Rancanumpang

c) Bentuk Kegiatan dan Program

Nama program ini yaitu "Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan". Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk edukasi kepada masyarakat dan fasilitasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara online.

Tabel 2. 1 Bentuk Kegiatan dan Program Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Narasumber
1.	Penyuluhan dan tanya jawab tentang jaminan sosial dan urgensitasnya untuk kelompok rentan khususnya pekerja informal	Tingginya tingkat antusiasme masyarakat dengan tingginya jumlah kehadiran	Dinas Sosial Kota Bandung
2.	Penyuluhan dan tanya jawab tentang konsep tenaga kerja beserta dengan upaya perlindungannya	Masyarakat Paham tentang konsep tenaga kerja beserta dengan upaya perlindungannya	Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung
3.	Penyuluhan dan tanya jawab tentang skema pembayaran BPJS Ketenagakerjaan beserta dengan simulasi pendaftarannya	Masyarakat memahami bagaimana skema beserta dengan pendaftarannya dan masyarakat dapat mengaplikasikan bagaimana caranya mendaftar BPJS Ketenagakerjaan secara online	BPJS Ketenagakerjaan Bandung
4.	Fasilitasi Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara online bagi masyarakat yang kurang paham teknologi atau ingin didaftarkan. (Masyarakat membawa dokumen- dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan pekerja sosial serta panitia membantu proses pendaftaran)	Meningkatnya angka kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di kelurahan rancanumpang	Praktikan sebagai Pekerja Sosial

d) Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang terlibat dalam program ini yaitu :

1. *Initiator system*

   Initiator system yaitu praktikan sebagai pekerja sosial yang dalam hal ini merupakan orang pertama yang mengakui keberadaan masalah dan merasa bahwa harus ada sebuah program yang akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sekitar untuk dapat membuat suatu tindakan yang membuat Kelurahan Rancanumpang menjadi lebih baik

2. *Change agent*

   Change agent dalam program ini yaitu pekerja sosial, Dinas Sosial Kota Bandung, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung serta BPJS Ketenagakerjaan Kota Bandung untuk melakukan penyuluhan di Kelurahan Rancanumpang. Pekerja sosial ini merupakan orang yang ditunjuk sebagai koordinator untuk upaya pemecahan masalah tersebut.

3. *Client System*

   Dalam hal ini *client system* yang menjadi penerima utama dalam program ini adalah Masyarakat Kelurahan Rancanumpang yang merupakan pekerja informal dan belum tercakup dalam BPJS Ketenagakerjaan.

4. *Support system*

   Support system yang mendukung upaya perubahan ini yaitu perangkat Kelurahan dan organisasi masyarakat setempat seperti Karang Taruna, dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)serta BPJS Ketenagakerjaan kota Bandung

5. *Controlling system*

   Controlling system dalam program ini yaitu Kepala Kelurahan Rancanumpang yang mempunyai otoritas dan kekuatan untuk menyetujui dan memerintahkan pelaksanaan atas perubahan yang diusulkan tersebut.

6. *Implementing system*

   Dalam hal ini *implementing system* yaitu organisasi lokal seperti Kelompok Tani, Kelompok Pembudidaya Ikan dan PKK yang memiliki tugas rutin melaksanakan dan mengelola pelaksanaan perubahan karena hampir semua pekerja pedagang, pertukangan dan PKK merupakan pekerja sektor informal.

7. *Target system*

   Target system dalam program ini yaitu merupakan masyarakat yang belum mempunyai BPJS Ketenagakerjaan terutama yang bekerja di

sektor informal. Lalu selanjutnya yang perlu diubah yaitu pemahaman dan kesadaran untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

8. *Action system*

   Action system dalam program ini yaitu pekerja sosial selaku praktikan, PKK selaku organisasi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan warga, kelompok tani sebagai organisasi yang menaungi para petani maupun buruh tani, serta kelompok pembudidaya ikan yang menaungi para pekerja sektor informal yang melakukan usaha budidaya ikan sehingga para elemen ini diharapkan untuk melaksanakan aksi agar intervensi berhasil

Tabel 2. 2 Sistem Partisipan Sosialisasi dan Pendampingan

No	**Sistem**	**Partisipan**
1	Initiator system	Pekerja Sosial
2	Change agent	Pekerja Sosial
3	Client System	Masyarakat kelurahan Rancanumpang yang bekerja di sektor informal
4	Support system	BPJS Ketenagakerjaan kota Bandung
5	Controlling system	Kepala kelurahan Rancanumpang
6	Implementing system	Karang Taruna dan Ibu PKK
7	Target system	Masyarakat kelurahan Rancanumpang yang bekerja di sektor informal
8	Action system	BPJS Ketenagakerjaan kota Bandung

e) Metode dan Teknik

Dalam pelaksanaan program "Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan", metode yang akan digunakan adalah community organization dan community development (COCD) yang merupakan perencanaan, pengorganisasian, atau proyek dan atau pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk teknik yang akan digunakan adalah penyuluhan dan fasilitasi.

1. Penyuluhan

Penyuluhan yaitu merupakan penyebarluasan informasi, edukasi, serta motivasi yang dilaksanakan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran dengan tujuan pengubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Penyuluhan dilakukan dengan menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat dan bersedia untuk melaksanakannya. Penyuluhan tidak lepas dari bagaimana agar sasaran penyuluhan dapat mengerti, memahami, tertarik, dan mengikuti apa yang disuluhkan dengan baik, benar, dan atas kesadarannya sendiri berusaha untuk menerapkan ide-ide baru dalam kehidupannya. Oleh karena itu penyuluhan membutuhkan suatu perencanaan yang matang, terarah, dan berkesinambungan.

Dalam program ini menggunakan teknik penyuluhan dengan tujuan agar memberikan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat Kelurahan Ranca numpang terutama yang bekerja di sektor informal agar mengetahui dan memahami dengan baik pentingnya menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan memahami bagaimana alur cara mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan bagaimana cara klaim manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan

2. Fasilitasi

Fasilitasi merupakan teknik untuk membuat mudah suatu proses. Orang yang melakukan fasilitasi disebut sebagai fasilitator. Dalam hal ini fasilitatornya merupakan pekerja sosial atau praktikan. Pekerja sosial akan membantu masyarakat dan memfasilitasi proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara online.

Dalam program ini menggunakan teknik fasilitasi yaitu bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat Kelurahan rancanumpang terutama yang bekerja di sektor informal untuk membantu partisipan dalam mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga melalui teknik ini dapat meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terutama di sektor pekerjaan informal

Strategi yang digunakan dalam Program “Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan” adalah strategi kolaborasi dan kampanye, dimana pekerja sosial berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membuat sistem sasaran setuju dengan sistem kegiatan, bahwa perubahan dibutuhkan dan di dukung pengalokasian sumber. Adapun taktik yang digunakan yaitu implementasi dan edukasi

d) Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Untuk memperkirakan jumlah anggaran yang nantinya diperlukan, maka diperlukan suatu rencana anggaran biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan

Tabel 2. 3 Tabel Rencana Anggaran Biaya Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	**Administrasi**				
	Proposal Pengajuan	50	Lembar	700	37.500
	Surat Menyurat	76	Lembar	700	57.000
	Jumlah I				**94.500**
2.	**Logistik**				
	Banner dan Spanduk 4X1	1	Buah	85.000	85.000
	ATK	1	Pack	35.000	35.000
	Jumlah II				**120.000**
3.	**Honorarium Narasumber Kegiatan**				
	Dinas Sosial Kota Bandung	1	Orang	1.000.000	1.000.000
	Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung	1	Orang	1.000.000	1.000.000
	BPJS Ketenagakerjaan kota Bandung	1	Orang	1.000.000	1.000.000
	Jumlah III				**3.000.000**
4.	**Konsumsi**				
	Snack Narasumber	3	Orang	10.000	30.000
	Snack Peserta	50	Orang	10.000	500.000
	Snack Panitia	15	Orang	10.000	150.000
	Snack Perwakilan Perangkat Kelurahan	3	Orang	10.000	30.000
	Makan Siang Narasumber	3	Orang	20.000	60.000
	Makan Siang Peserta	50	Orang	15.000	750.000
	Makan Siang Panitia	15	Orang	15.000	225.000
	Makan Siang Perwakilan Perangkat Kelurahan	3	Orang	15.000	45.000
	Jumlah IV				**1.790.000**
	Jumlah Keseluruhan :		**5.194.500**		

e) Analisis Kelayakan Program

Untuk menganalisis kelayakan program, menggunakan analisis SWOT sehingga dapat dijadikan tolak ukur menganalisis apa saja kekuatan, kelemahan. kesempatan, serta ancaman di dalam program.

Matriks 2. 1 Analisis SWOT Program "Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Programming BPJS Ketenagakerjaan"

	Strength	***Weakness***
Internal Eksternal	• Tingginya antusiasme masyarakat jika ada kegiatan baru • Masyarakat Memiliki kemauan untuk melakukan perubahan • Rasa ingin tahu masyarakat terkait jaminan social terbilang cukup tinggi	• Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan jaminan sosial • Kemampuan iptek rendah sehingga bisa menghambat pendaftaran secara online
Opportunity	**Strategi SO**	**Strategi WO**
• Adanya Kelembagaan lokal seperti pkk dan karang taruna • Adanya dukungan dari perangkat desa setempat dan berbagai pihak seperti BPJS Ketenagakerjaan kota Bandung dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung • BPJS Ketenagakerjaan kota b Bandung sangat terbuka untuk menjalin untuk menjalin kerjasama	• Melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak	• Memberikan pengetahuan tentang jaminan social khususnya BPJS Ketenagakerjaan bagi BPU
Threats	**Strategi ST**	**Strategi WT**
• Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang baru pertama kali dilakukan di kelurahan Rancanumpang sehingga berpotensi adanya *trial and error*	• Pekerja sosial memfasilitasi dan melakukan pendampingan proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan	• Panitia Mempelajari proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan

f) Jadwal dan Langkah-langkah

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 3 yaitu tahap persiapan, pelaksanaan program, dan pengakhiran dengan rincian sebagai berikut:

1. Persiapan

a. Membentuk kepanitiaan.

Kepanitiaan ini terdiri dari Pekerja Sosial sebagai koordinator dan anggota kepanitiaan lain diambil dari perwakilan karang taruna dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

b. Melakukan rapat

Rapat dilakukan untuk membahas mengenai konsep kegiatan dan penjadwalan kerja. Rapat ini diadakan di kantor desa. Adapun dalam rapat ini akan membahas terkait dengan siapa saja yang akan dijadikan *client system*, siapa saja yang akan mengisi acara dan bagaimana agenda kegiatan, serta hal lain yang termasuk dalam konsep kegiatan.

c. Menyatakan Komitmen Untuk Mengungkapkan Janji Hati

Panitia menyatakan komitmen untuk mengungkapkan janji hati dan sumbangkan apa yang dapat diberikan dalam menunjang kelancaran program Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu tujuannya untuk menyatakan komitmen adalah agar pantai yang sudah terbentuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan program sehingga program dapat berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan tujuannya

d. membuat proposal kegiatan dan surat.

Untuk surat kepada peserta, dicantumkan “bagi peserta yang ingin langsung dibantu dalam proses pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, harap membawa handphone, KTP, dan KK”.

e. Masing-masing panitia yang bersangkutan mengurus perizinan kegiatan.

f. Divisi sarana prasarana menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan

g. Humas menyebarkan surat-surat yang dibuat oleh sekretaris kepada peserta, perangkat kelurahan dan narasumber.

h. Panitia berlatih untuk tata cara pembuatan BPJS Ketenagakerjaan secara online.

2. Pelaksanaan

Tabel 2. 4 Tahapan pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

No	Waktu	Durasi	Acara	Pengisi Acara
1.	07.00-08.00	60’	Registrasi peserta	Disiapkan daftar hadir oleh divisi acara
2.	08.00-08.05	5’	Pembukaan acara	MC
3.	08.05-08.10	5’	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Dirijen
4.	08.10-08.20	10’	Sambutan Kepala Kelurahan	Kepala kelurahan Rancanumpang
5.	08.20-08.30	10’	Sambutan ketua pelaksana atau koordinator	Koordinator
6.	08.30-09.15	45’	Penyuluhan tentang jaminan sosial dan urgensitasnya untuk kelompok rentan khususnya pekerja informal	Dinas Sosial Kota Bandung
7.	09.15-09.30	15’	Tanya jawab	
8.	09.30-10.15	45’	Penyuluhan tentang konsep tenaga kerja beserta dengan upaya perlindungannya	Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung
9.	10.15-10.30	15’	Tanya jawab	
10.	11.30-12.15	45’	Penyuluhan tentang skema pembayaran BPJS Ketenagakerjaan beserta dengan simulasi pendaftarannya	BPJS Ketenagakerjaan kota Bandung
11.	12.15-12.30	15’	Tanya jawab	BPJS Ketenagakerjaan kota Bandung
12	12.30-13.00	30’	Ishoma	Semua peserta
13.	13.00-14.00	60’	Fasilitasi Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara online bagi yang berminat namun terdapat keterbatasan penggunaan iptek	Pekerja sosial dan panitia
14.	14.00-14.05	05’	Penutupan	MC

3. Pengakhiran

a. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur bagaimana keberhasilan suatu program. Evaluasi dalam program "Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan" penting karena sebagai suatu proses yang mengkaji secara kritis program, aktivitas, kebijakan, atau semacamnya. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kegiatan dan hasil program. Tujuannya untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk pertimbangan keputusan.

Evaluasi dalam program ini dilakukan dengan pembuatan angket yang disebarkan kepada *ex* partisipan program beberapa hari setelah program dilaksanakan. Pembagian kuesioner dilakukan oleh humas, sama seperti pada saat membagikan surat undangan

Selain itu evaluasi dari program ini juga dilihat dari seberapa tinggi tingkat partisipasi peserta dalam mendaftarkan dirinya untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mengetahui program dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Rancanumpamg

b. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dan pembubaran panitia

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) adalah laporan dalam bentuk dokumen tertulis untuk melaporkan pelaksanaan sebuah kegiatan. Fungsi dari laporan pertanggungjawaban adalah sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.

Nantinya, hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas kegiatan di masa mendatang. Di dalam laporan pertanggungjawaban juga memuat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana.

Laporan pertanggungjawaban penting karena sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan kewajiban dari panitia kepada pihak kelurahan Rancanumpang setelah menjalankan Program "Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan"

Setelah kegiatan evaluasi selesai, selanjutnya yaitu membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi tentang laporan pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengakhiran. Laporan tersebut diberikan kepada Lurah. Setelah semua tugas dan kegiatan sudah dilaksanakan sepenuhnya, maka panitia dibubarkan.

B. Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

PENGOPTIMALAN DAN PENDAMPINGAN KPM BPNT DALAM PEMANFAATAN DANA BANTUAN BPNT

1. Gambaran Umum Masalah

Berdasarkan data yang praktikan peroleh terdapat 83 KPM di kelurahan Rancanumpang yang mendapatkan bantuan BPNT. Dalam hal ini, tujuan dari BPNT atau Bantuan Pangan Non Tunai adalah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin untuk membantu kesejahteraan kehidupan mereka terutama dalam bentuk bahan makanan pokok. Nilai Besaran yang didapatkan oleh KPM penerima BPNT adalah sebesar Rp. 200.000,- per bulan yang diberikan secara tunai dan digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga KPM dapat memperoleh nutrisi yang lebih seimbang,

Namun dalam praktiknya, masih banyak KPM di kelurahanRancanumpang yang tidak mengalokasikan dana dari program BPNT dengan semestinya dan tidak mengelola dana dengan baik. KPM sering membelanjakan uang dari program BPNT untuk hal yang tidak terlalu diperlukan seperti alat elektronik, baju, dan membayar keperluan lain. Padahal pemerintah dalam hal ini sebagai sumber dana sekaligus penyelenggara dari program BPNT mempunyai tujuan yang hendaknya dicapai yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan KPM.

Jika pengalokasian dana tersebut terus menyimpang, makaakan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari program BPNT yang justru malah akan mengakibatkan kerentanan pangan. Hal ini seharusnya disadari oleh para penerima BPNT bahwa adanya bantuan sosial tersebut memiliki tujuan yang hendaknya dicapai sehingga mereka harus mengelola dana sebaik mungkin dan dialokasikan sesuai dengan tujuan dari program yakni memutus rantai kemiskinan sebagai tanggungjawab mereka selaku penerima bantuan.

2. Tinjauan Konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih.

a. Konsep Bantuan Sosial

Menurut UU No 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial dijelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko social

Penerima bansos adalah seseorang, keluarga, kelompok atau

masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pemberian bansos bertujuan untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan risiko sosial.

Berikut enam tujuan bansos:

1. Rehabilitasi Sosial, yaitu bansos yang diberikan bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Perlindungan Sosial, yaitu pemberian bansos disalurkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
3. Pemberdayaan Sosial, yaitu bertujuan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan Sosial, yaitu bansos sebagai jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Penanggulangan Kemiskinan, bahwa bansos merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Penanggulangan Bencana, yaitu bertujuan untuk penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. Secara umum, bansos dibedakan menjadi tiga jenis. Yaitu bantuan sosial langsung (berupa uang diberikan secara langsung secara tunai maupun non tunai), bantuan sosial berupa barang (bantuan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu, dan lain-lain) serta bantuan sosial berupa jasa (bantuan berupa jasa

b. Konsep Program Bantuan BPNT

1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah pengganti dari beras sejahtera (RASTRA) dalam bentuk non tunai oleh pemerintah yang akan diberikan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang diberikan setiap bulannya di akun elektronik yang bisah digunakan untuk membeli bahan

pangan di pedagang bahan pangan /e-warong yang bekerja sama dengan bank, untuk penyaluran BPNT dilakukan bertahap mulai tahun 2017.

2. Manfaat dan Tujuan Program BPNT

Adapun manfaat dan tujuan program BPNT yang tersusun dalam buku pedoman umum program Bantuan Pangan Non Tunai, ialah sebagai berikut:

a. Tujuan BPNT
   1. Meningkatkan gizi masyarakat yang telah terdaftar menjadi KPM.
   2. Memberikan kelonggaran untuk memilih dan mengontrol pemenuhan kebutuhan pangan oleh KPM sendiri.
   3. Meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
   4. Pengurangan beban pengeluaran KPM dengan pemenuhan sebagai kebutuhan pangan.
   5. Meningkatkan efektivitas ketepatan sasaran pemilihan KPM dan waktu penyaluran bantuan pangan.

b. Manfaat Program BPNT
   1. Meningkatkan efisiensi penerapan bantuan sosial.
   2. Meningkatkan transaksi nontunai dalam upaya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
   3. Meningkatkan pertumbuhan di sektor ekonomi khususnya untuk usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan,
   4. Memberikan akses jasa keuangan kepada e-warung dan KPM.
   5. Meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat miskin (KPM) sekaligus sebagai upaya perlindungan sosial dalam penanggulangan kemiskinan

3. Penerima Manfaat Program BPNT

Penerima BPNT ialah seorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin yang tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial. Kriteria pemilihan seorang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat (KPM) dari program BPNT ini ialah berdasarkan dengan tolak ukur 25% masyarakat dengan keadaan sosial ekonomi terendah dari daerah pelaksana program. Sumber data daftar penerima bantuan dari program BPNT telah ditetapkan oleh Menteri Sosial yang berasal dari (DTPPFM) yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu pada tahun 2015. DT-PPFM ini dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelolaan Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin.

3. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

1) Penyebab Masalah

Penyebab masalah yang ada yaitu KPM BPNT belumpaham bagaimana pengelolaan dana BPNT beserta dengan skala prioritasnya pada permasalahan pengelolaan dana BPNT tidak sesuai dengan tujuan program, dan penyebab lain yaitu kurangnya kesadaran dari KPM dalam pemanfaatan dana BPNT. Permasalahan utama yang perlu untuk diselesaikan yaitu KPM BPNT belum paham bagaimana pengelolaan dana BPNT beserta dengan skala prioritasnya pada permasalahan pengelolaan dana BPNT tidak sesuai dengan ketentuan program

2) Dampak Masalah

Dampak yang terjadi yaitu pengentasan kemiskinan melalui Program BPNT tidak berjalan dengan efektif pada keluarga tertentu pada permasalahan pengelolaan dana BPNT tidak sesuai dengan tujuan program. Dampak lain yang terjadi yaitu menurunnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat Jadi, dampak utama yang urgent untuk diselesaikan yaitu pengentasan kemiskinan melalui Program BPNT tidak berjalan dengan efektif pada keluarga tertentu pada permasalahan pengelolaan dana BPNT tidak sesuai dengan ketentuan program.

3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Setelah mengetahui apa saja permasalahan terkait dengan sumber dana bantuan sosial di Kelurahan Rancanumpang dengan mempertimbangkan pada penyebab utama yaitu kurangnya kesadaran KPM BPNT tentang pertanggungjawaban dana bantuan sehingga pengentasan kemiskinan melalui Program BPNT tidak berjalan dengan efektif pada keluarga tertentu. Maka dapat disimpulkan fokus masalah yang dikaji yaitu terkait dengan banyak KPM BPNT yang tidak mengelola dan memanfaatkan dana bantuan sebagaimana mestinya. Masih banyak KPM BPNT di Kelurahan Rancanumpang yang tidak tepat dalam pengelolaan dana BPNT bahkan dalam pengelolaan keuangan keluarga sehingga dapat berpotensi memperburuk kondisi ketahanan pangan mereka.

Fokus masalah ini juga sesuai dari pengakuan tksk di Kelurahan Rancanupang yaitu Ibu Susi yang mengakui bahwa masih banyak KPM bpnt yang memanfaatkan dana bantuan bpnt bukan untuk membelikan bahan pangan melainkan menggunakannya untuk hal yang lain seperti untuk dibelanjakan baju atau membayar utang.

4) Analisis Pohon Masalah

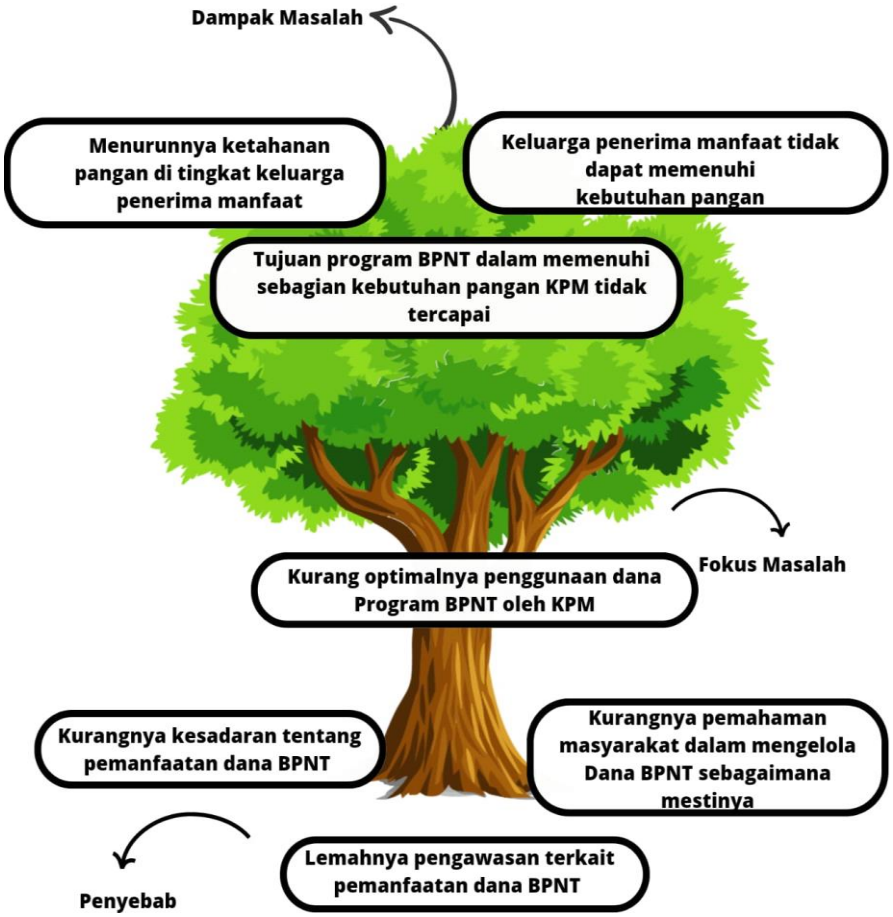

Gambar 2. 2 Analisis Pohon Masalah Isu Sumber Dana Bantuan Sosial

Berdasarkan analisis pohon masalah tersebut, fokus masalah yang dikaji yaitu banyak KPM BPNT di Kelurahan Rancanumpang yang tidak mengelola dan mengalokasikan dana bantuan BPNT sebagaimana mestinya. Penyebab utamanya adalah KPM BPNT belum paham bagaimana pengelolaan dana BPNT beserta dengan skala prioritasnya. Penyebab lainnya yaitu kurangnya kesadaran tentang pemanfaatan dana bantuan BPNT dan KPM BPNT tidak menyadari dampak yang terjadi dari pengelolaan keuangan yang salah. Lalu dampak utama yang terjadi yaitu pengentasan kemiskinan melalui Program BPNT tidak berjalan dengan efektif pada keluarga tertentu. Kemudian dampak lainnya yaitu tidak ada tanggung jawab pemanfaatan dana penerima BPNT selaku penerima bantuan dan KPM BPNT memiliki pengelolaan keuangan yang buruk.

b. Identifikasi Kebutuhan

Melihat pada penyebab masalah yang dikaji melalui pohon masalah yang mana penyebab utama masalah ini adalah KPM BPNT belum paham bagaimana pengelolaan dana BPNT beserta dengan skala prioritasnya. Penyebab lainnya yaitu kurangnya kesadaran tentang pemanfaatan dana bantuan BPNT dan KPM BPNT tidak menyadari dampak yang terjadi dari pengelolaan keuangan yang salah.

Maka diperlukan program khusus terkait pengelolaan serta pemanfaatan dana BPNT dengan mengatur skala prioritas kebutuhan sesuai dengan komponen tanpa membeli barang yang tidak diperlukan. Selain itu juga diperlukan capacity building yang dapat mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan sehingga para KPM tidak membeli barang yang tidak diperlukan, bahkan diharapkan uang sisa hasil dari pembelian sesuai dengan kebutuhan komponen.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

1. Sistem sumber informal
   Bentuk dari sumber informal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu nasihat dari keluarga atau teman KPM BPNT terkait dengan pengelolaan dana bantuan.

2. Sistem sumber formal
   Bentuk dari sumber formal yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu kelompok sesama KPM yang dihimpun dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
3. Sistem sumber kemasyarakatan
   Bentuk dari sumber kemasyarakatan yang bisa dimanfaatkan dalam upaya pemecahan masalah ini yaitu Dinas Sosial Kota Bandung

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Berdasarkan hasil asesmen di Kelurahan Rancanumpang, banyak KPM BPNT yang tidak mengelola dan memanfaatkan dana bantuan sebagaimana mestinya. Penyebab utamanya adalah KPM BPNT belum paham bagaimana pengelolaan dana BPNT beserta dengan skala prioritasnya. Penyebab lainnya yaitu kurangnya kesadaran tentang pemanfaatan dana bantuan BPNT dan KPM BPNT tidak menyadari dampak yang terjadi dari pengelolaan keuangan yang salah.

Maka dari itu dibutuhkan program sosialisasi dan monitoring terkait dengan pengelolaan dana bantuan. Lalu sistem sumber formal berupa kelompok sesama KPM yang dihimpun dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kemudian sistem sumber kemasyarakatan berupa Dinas Sosial Kota Bandung, Dengan kegiatan berupa pelatihan mengelola dana sesuai dengan komponen BPNT , praktik penyusunan anggaran keuangan keluarga, sesi diskusi dan konsultasi serta pembagian buku tabungan untuk meningkatkan motivasi menabung.

Tujuan Umum Dan Khusus

Adapun tujuan umum yang akan diperoleh yaitu :

1. Memberikan pemahaman kepada KPM BPNT terkait dengan pedoman pengelolaan dana BPNT
2. Memberikan pengetahuan tentang pengaturan skala prioritas dana bantuan

Tujuan khusus yang akan diperoleh yaitu :

1. Dapat mengubah perilaku KPM yang semula tidak mengelola dengan semestinya menjadi sesuai dengan tujuan program BPNT
2. Menumbuhkan jiwa rajin menabung pada KPM
3. KPM dapat membuat anggaran kebutuhan keluarga

b. Bentuk kegiatan dan Program

Nama program ini yaitu “Sosialisasi dan Pendampingan KPM dalam pemanfaatan dana BPNT ”. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk edukasi dan capacity building kepada KPM BPNT . Untuk sasarannya yaitu para penerima BPNT di Kelurahan Rancanumpang yang terdiri dari 83 KPM BPNT yang sudah dipilih sebagai client system.

Adapun kegiatan dalam program ini yaitu :

1. Pelatihan Mengelola Dana Sesuai Dengan Komponen BPNT.

   Dalam hal ini, pendamping BPNT memberikan penjelasan terkait dengan untuk apa saja dana bantuan disalurkan sesuai dengan masing-masing komponen BPNT

2. Monitoring KPM dalam pemanfaatan dana program BPNT
   Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengawasi kepada KPM BPNT terkait dengan penggunaan dana BPNT
3. Sesi Diskusi dan Konsultasi

   Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan diskusi dan konsultasi. Para KPM BPNT dapat berdiskusi dan mengkonsultasikan keluhan dan kendala

apa saja yang mereka alami dalam pengelolaan keuangan sehingga bisa mendapatkan saran dan solusi.

c. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang terlibat dalam program ini yaitu :

1. *Initiator system*

   Initiator system yaitu praktikan sebagai pekerja sosial yang dalam hal ini merupakan orang pertama yang mengakui keberadaan masalah dan merasa bahwa harus ada sebuah program yang dapat mengubah perilaku KPM BPNT dalam pengelolaan dana bantuan serta meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangan keluarga.
2. *Change agent*

   Change agent dalam program ini yaitu Pekerja Sosial, dan TKSK Kecamatan Gedebage yang melakukan perubahan agar sesuai dengan tujuan program.
3. *Client system*

   Client system yang menjadi penerima utama dalam program ini adalah KPM BPNT di kelurahan Rancanumpang.
4. *Support system*

   Support system yang mendukung upaya perubahan ini yaitu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan karang taruna kelurahan Rancanumpang. Support system ini akan mendukung kegiatan dengan memberikan sumbangsih baik berupa moril maupun materiil
5. *Controlling system*

   Controlling system dalam kegiatan ini yaitu kepala Kelurahan Rancanumpang yang mempunyai otoritas dan kekuatan untuk menyetujui dan memerintahkan pelaksanaan atas perubahan yang diusulkan tersebut.
6. *Implementing system*

   Dalam hal ini *implementing system* yaitu TKSK Kecamatan Gedebage yang memiliki tugas mengelola pelaksanaan perubahan secara berkelanjutan.
7. *Target system*

   Target system dalam program ini yaitu merupakan 40 KPM BPNT yang sudah dipilih. Lalu selanjutnya yang perlu diubah yaitu

pemahaman dan kesadaran KPM BPNT serta pengubahan perilaku agar memanfaatkan dana bantuan sebagaimana mestinya

8. *Action system*

   Action system dalam program ini yaitu pekerja sosial selaku praktikan, TKSK Kecamatan Gedebage sebagai penggerak.

Tabel 2. 5 Sistem Partisipan "Sosialisasi dan Pendampingan KPM dalam pemanfaatan dana BPNT"

No	Sistem	Partisipan
1	Initiator system	Pekerja Sosial
2	Change agent	Pekerja Sosial dan TKSK Kecamatan Gedebage
3	Client System	KPM BPNT
4	Support system	Ibu PKK dan karang taruna
5	Controlling system	Kepala kelurahan Rancanumpang
6	Implementing system	TKSK Kecamatan Gedebage
7	Target system	KPM BPNT
8	Action system	Pekerja Sosial dan TKSK Kecamatan Gedebage

d. Metode dan Teknik

Dalam pelaksanaan program "Penguatan Ekonomi dalam Pengelolaan Dana KPM BPNT ", metode yang akan digunakan adalah community organization dan community development (COCD) yang merupakan perencanaan, pengorganisasian, atau proyek dan atau pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program atau proyek kemasyarakatan yang tujuan utamanya meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial masyarakat.

Teknik yang digunakan yaitu :

1. Penyuluhan

Yaitu merupakan penyebarluasan informasi, edukasi, serta motivasi yang dilaksanakan oleh penyuluh kepada kelompok sasaran dengan tujuan pengubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

2. Focus Group **Discussion** (FGD).

FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai.

Strategi yang digunakan adalah strategi kampanye dan kolaborasi. Strategi kolaborasi dilakukan dengan meyakinkan sistem sasaran tentang pentingnya perubahan. Sedangkan strategi kampanye dapat dilakukan antara sistem sasaran dan sistem pelaksana perubahan. Dengan demikian sistem pelaksana perubahan masih mungkin untuk memberikan penjelasan dengan tujuan untuk meyakinkan sistem sasaran. Untuk taktik yang digunakan yaitu edukasi, persuasi, dan capacity building

e. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Untuk memperkirakan jumlah anggaran yang nantinya diperlukan, maka diperlukan suatu rencana anggaran biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2. 6 Rencana Anggaran Biaya Program "Sosialisasi dan Pendampingan KPM dalam pemanfaatan dana BPNT"

	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	**Administrasi**				
	Proposal Pengajuan	64	Lembar	750	48.000
	Surat Menyurat	50	Lembar	750	37.500
	Jumlah I				**85.500**
2.	**Logistik**				
	Banner dan Spanduk 1X1	1	Buah	25.000	25.000
	Buku Tabungan	40	Buah	1.500	60.000
	Jumlah II				**85.000**
3.	**Konsumsi**				
	Snack Narasumber	2	Orang	10.000	20.000
	Snack Peserta	60	Orang	10.000	600.000
	Snack Panitia	10	Orang	10.000	100.000
	Snack Perwakilan Kelurahan	3	Orang	10.000	30.000
	Jumlah III				**750.000**
4.	**Honorarium**				
	TKSK kecamatan Gedebage	1	Orang	500.000	500.000
	Jumlah IV				**500.000**
	Jumlah Keseluruhan : 1.975.500				

f. Analisis Kelayakan Program

Untuk menganalisis kelayakan program, maka diperlukan analisis SWOT sehingga dapat dijadikan tolak ukur menganalisis apa saja kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman di dalam program "Sosialisasi dan pendampingan KPM dalam pemanfaatan Dana BPNT"

Matriks 2. 2 Analisis SWOT Program Sosialisasi dan pendampingan KPM dalam pemanfaatan Dana BPNT

	Kekuatan: ● KPM BPNT terbuka dan menyadari kesalahan Penyalahgunaan Pemanfaatan dana KPM BPNT	**Kelemahan:** KPM BPNT memiliki rasa takut untuk mengikuti program karena sudah memanfaatkan dana bantuan tidak sesuai ketentuan
Peluang: ● Adanya dukungan dari kelurahan, ketua RW dan karang taruna dalam menjalankan program	**Strategi SO** Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengimplementasikan program	**Strategi WO** Memberikan surat edaran terkait program untuk KPM BPNT
Ancaman Sulit untuk melakukan monitoring	**Strategi (ST)** Membuat buku laporan pemanfaatan dana untuk KPM BPNT	**Strategi (WT)** Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran KPM BPNT dalam memanfaatkan dana bantuan

g. Jadwal dan Langkah-langkah

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 3 yaitu tahap persiapan, pelaksanaan program, dan pengakhiran dengan rincian sebagai berikut:

1. Persiapan

a) Membentuk kepanitiaan.

Kepanitiaan ini terdiri dari Pekerja Sosial sebagai koordinator dan anggota kepanitiaan lain diambil dari perwakilan karang taruna dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

b) Melakukan rapat

Rapat dilakukan untuk membahas mengenai konsep kegiatan dan penjadwalan kerja. Rapat ini diadakan di kantor desa. Adapun dalam rapat ini akan membahas terkait dengan siapa saja yang akan dijadikan client system, siapa saja yang akan mengisi acara dan bagaimana agenda kegiatan, serta hal lain yang termasuk dalam konsep kegiatan.

c) Menyatakan Komitmen Untuk Mengungkapkan Janji Hati

Panitia menyatakan komitmen untuk mengungkapkan janji hati dan sumbangkan apa yang dapat diberikan dalam menunjang kelancaran program Program Sosialisasi dan pendampingan KPM dalam pemanfaatan Dana BPNT.

Selain itu tujuannya untuk menyatakan komitmen adalah agar panitia yang sudah terbentuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan program sehingga program dapat berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan tujuannya

d) membuat proposal kegiatan dan surat.

Untuk surat kepada peserta, dicantumkan sebagai tujuna untuk Sosialisasi Pemanfaatan Dana BPNT.

e) Masing-masing panitia yang bersangkutan mengurus perizinan kegiatan.

f) Divisi sarana prasarana menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan

g) Humas menyebarkan surat-surat yang dibuat oleh sekretaris kepada peserta, perangkat kelurahan dan narasumber.

h) Panitia berlatih untuk pencatatan pemanfaatan dana BPNT.

Tujuannya agar panitia dapat mempersiapkan dirinya dalam mengetahui tata cara dalam mencatat penggunaan Dana BPNT, sehingga mempermudah pada saat tahap pelaksanaan yaitu Pelatihan pencatatn pemanfaatan dana bantuan BPNT.

2. Pelaksanaan

Kegiatan dalam program ini dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2023 yang bertempat di aula kelurahan Rancanumpang

Tabel 2. 7 Tahapan Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan pendampingan KPM dalam pemanfaatan Dana BPNT

	Waktu	**Durasi**	**Acara**	**Pengisi Acara**
1.	07.00-08.00	60’	Registrasi peserta	Disiapkan daftar hadir oleh divisi acara
2.	08.00-08.05	5’	Pembukaan acara	MC
3.	08.05-08.10	5’	Menyanyikan lagu Indonesia Raya	Dirijen
4.	08.10-08.20	10’	Sambutan Kepala Kelurahan	Kepala kelurahan Rancanumpang
5.	08.20-08.30	10’	Sambutan ketua pelaksana atau koordinator	Koordinator
6.	08.30-09.00	30’	Pelatihan mengelola dana sesuai dengan komponen PKH.	Dinas Sosial Kota Bandung
7.	09.0-09.30	30’	Praktik Penyusunan Anggaran Keuangan Keluarga	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)
8.	09.30-10.15	45’	Sesi Diskusi dan Konsultasi	Pekerja Sosial
9	10.30-11.45	05’	Penutupan	MC

3. Pengakhiran

a. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui angket yang diberikan. Adapun angket akan disebarkan kepada partisipan beberapa hari setelah kegiatan.

b. Pembuatan laporan pertanggungjawaban

Setelah rangkaian kegiatan program Penguatan Ekonomi dalam Pengelolaan Dana KPM PKH dilakukan, maka dibuatlah laporan pertanggungjawaban program

c. Pembubaran panitia

Seiring dengan berakhirnya program“Sosialisasi dan pendampingan KPM dalam pemanfaatan Dana BPNT

C. Profil Pemberdayaan Sosial

PENINGKATAN KAPASITAS KADER POSYANDU LANSIA DALAM MENANGANI LANSIA PENYANDANG DISABILITAS

1. Gambaran Umum Masalah

Posyandu Lansia merupakan salah satu pelayanan bagi masyarakat lanjut usia yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan mewujudkan masa tua yang bahagia, sehat, mandiri dan berdaya guna. Program dan layanan Posyandu Lansia dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Sasaran posyandu lansia yaitu: pra usia lanjut (45-59 tahun), usia lanjut (> 60 tahun), usia lanjut dengan risiko tinggi (>70 tahun). Selain itu, sasaran Posyandu Lansia diantaranya adalah keluarga lansia, organisasi sosial di bidang pembinaan orang lansia dan masyarakat secara luas.

Posyandu lansia memiliki peran penting untuk menjaga kualitas hidup Lansia di masyarakat, karena posyandu lansia merupakan unit pelayanan kesehatan terkecil yang paling dekat keseharian warga dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para orang tua yang lebih rentan terhadap penyakit.

Di Kelurahan Rancanumpang memiliki delapan posyandu yang berada di seluruh RW Kelurahan Rancanumpang yang berperan penting dalam menjaga kualitas hidup Lansia di masyarakat. Jumlah lansia yang berada di Kelurahan Rancanumpang sendiri berjumlah sebanyak 177 orang, dengan sebanyak 9 orang diantaranya adalah lansia penyandang disabilitas.

Jenis kegiatan yang dilakukan di Posyandu Lansia yaitu: pengukuran IMT yang terdiri dari pengukuran berat badan dan tinggi badan; pemeriksaan tekanan darah; cek kadar gula darah dan kolesterol yang dilakukan sebanyak dua bulan sekali.

Namun dalam pelaksanaannya, pelayanan yang diberikan posyandu lansia kurang optimal kepada lansia penyandang disabilitas yang dimana lansia penyandang disabilitas memerlukan pelayanan khusus seperti Pemenuhan kebutuhan terapi dan layanan kesehatan berbasis kebutuhan ragam disabilitas dan Penyediaan layanan kesehatan yang ramah disabilitas, mudah diakses, serta terjangkau. Sehingga diperlukan solusi untuk meningkatkan kapasitas dari kader Posyandu

2. Tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih

a. Kajian Pemberdayaan Sosial

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber menjadi kata”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapat sisipan –m- dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka

2. Tujuan Pemberdayaan

Suharto (2005:60) menjelaskan hal yang senada bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dimaknai sebagai suatu proses dan juga tujuan. Menurut pandangannya, pemberdayaan masyarakat dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Sebagai sebuah proses

   Artinya disini pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat tak terkecuali masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan.

b. Sebagai tujuan

   Pemberdayaan masyarakat yang diartikan sebagai tujuan adalah keadaan yang ingin dicapai baik dari suatu perubahan sosial yang mana menjadi masyarakat yang lebih berdaya, memiliki kekuasaan juga pengetahuan dan kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik lagi. Baik di sisi ekonomi maupun bersifat sosial seperti kepercayaan diri, dan sebagainya.

Fahrudin (2012:96-97) dalam bukunya menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat memampukan dan memandirikan masyarakat, yakni sebagai berikut ini:

1) Enabling

   Pemberdayaan masyarakat dapat memungkinkan atau menciptakan suasana atau iklim yang memberi kesempatan potensi masyarakat untuk berkembang. Dengan adanya upaya pemberdayaan ini, diharapkan dapat mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan

kesadaran (awareness) masyarakat akan potensi yang dimiliki dan berkelanjutan untuk dapat mengembangkannya.

2) Empowering

Kedua, dengan adanya pemberdayaan masyarakat nantinya dapat meningkatkan kapasitas dengan cara memperkuat potensi atau daya yang dimiliki dengan langkah-langkah nyata seperti menyerap berbagai masukan atau input hingga serta membuka akses kepada berbagai peluang yang dapat semakin memberdayakan masyarakat.

3) Protecting

Melengkapi dua poin diatas, poin selanjutnya adalah protecting atau melindungi yang dimana disini adalah mengembangkan perlindungan untuk masyarakat yang menjadi subjek pengembangan melalui pemberdayaan ini. Sebagai contohnya adalah melindungi agar tidak

b. Kajian Program Posyandu Lansia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Dasar di Pos Pelayanan Terpadu, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lanjut Usia menurut Pedoman Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia oleh Komisi Nasional Lanjut Usia tahun 2010 adalah suatu wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat, yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM), lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, swasta, organisasi sosial dan lain-lain, dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif. Disamping pelayanan kesehatan, di Posyandu Lanjut Usia juga dapat diberikan pelayanan sosial, agama, pendidikan, ketrampilan, olah raga dan seni budaya serta pelayanan lain yang dibutuhkan para lanjut usia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Selain itu mereka dapat beraktifitas dan mengembangkan potensi diri.

Landasan hukum yang mendasari Posyandu Lansia diantaranya:

1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2) Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia

3) Peraturan Pemerintah RI Nomor. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut usia Menurut Petunjuk Teknik Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia dan Posbindu PTM terintegrasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2021 Tujuan posyandu lansia secara umum adalah untuk meningkatkan status kesehatan dan kualitas hidup lansia. Pelayanan kesehatan di posyandu lansia bersifat promotif dan preventif dalam bentuk deteksi dini masalah kesehatan, peningkatan pengetahuan, dan membantu mempertahankan dan meningkatkan kondisi kesehatan lansia baik fungsi fisik, psikologis dan sosialnya.

Sasaran Posyandu Lansia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Sasaran Langsung
   a) Pra lanjut usia (usia 45 - 59 tahun)
   b) Lanjut usia (usia ≥ 60 tahun)
   c) Lanjut usia risiko tinggi, yaitu usia ≥ 70 tahun atau lansia berusia ≥ 60 tahun dengan masalah kesehatan.
2) Sasaran tidak langsung
   a) Keluarga dimana lansia berada
   b) Masyarakat di lingkungan lansia
   c) Petugas kesehatan yang melayani kesehatan lansia
   d) Kader kesehatan Posyandu Lansia
   e) Petugas lain yang menangani Posyandu Lansia
   f) Pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial yang peduli terhadap pembinaan kesehatan lansia

c. Konsep Lansia

Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia menyebutkan bahwa lanjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Ada dua jenis lanjut usia yakni:

1) Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
2) Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1998, pemerintah bertugas mengarahkan membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Pemberdayaan lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia dimaksudkan agar lanjut usia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

d. Kajian Disabilitas

Penyandang Disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 1 bahwa: "Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."

Keterbatasan dalam perundangan tersebut, diartikan sebagai kondisi seseorang yang mengalami disfungsi baik dari organ tubuh, emosi, maupun kemampuan kognitif seseorang yang menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Hal ini juga diperkuat dengan adanya UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas yang dimaksud penyandang disabilitas adalah: "termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya".

Sama seperti warga negara lainnya, penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sebagaimana termuat dalam Konvensi Perlindungan Penyandang Disabilitas. Adapun yang termuat dalam konvensi tersebut terdapat beberapa prinsip untuk melindungi para penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya yang setara dengan warga negara lainnya diantaranya yaitu, a) menghormati harkat dan martabat penyandang disabilitas, b) non- diskriminatif, c) partisipasi penuh, d) aksesibilitas, serta e) penghormatan terhadap perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keanekaragaman manusia dan kemanusiaan (Wardani, 2021).

3. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

Menurut informasi yang didapatkan oleh praktikan dari Ibu Susi selaku ketua posyandu RW 01 pelaksanaan Posyandu Lansia dilakukan secara rutin yaitu setiap dua bulan, Pelaksanaan posyandu lansia dilakukan bersamaan dengan posyandu balita yaitu di hari Sabtu minggu kedua. Peserta yang hadir pada Posyandu Lansia jika dirata-ratakan sekitar 10 - 20 orang tiap pertemuan. Dalam pelaksanaan Posyandu disabilitas hanya melaksanakan kegiatan pemeriksaan lansia secara umum yaitu seperti pengukuran berat badan dan tinggi badan; pemeriksaan tekanan darah; cek kadar gula darah dan kolesterol. Padahal terdapat 9 lansia penyandang disabilitas yang memerlukan pemeriksaan secara khusus.

1) Penyebab masalah

a. Minimnya fasilitas Posyandu dalam menangani lansia disabilitas

   Minimnya fasilitas Posyandu dikarenakan sedikitnya anggaran Posyandu dalam menjalankan kegiatannya. Anggaran Posyandu biasanya berasal dari dana sukarela masyarakat. Sehingga dikarenakan minimnya anggaran untuk operasional Posyandu mengakibatkan minimnya fasilitas yang dimiliki oleh posyandu

b. Kurangnya pengetahuan kader Posyandu dalam menangani lansia disabilitas

   Kader Posyandu tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan seputar disabilitas. Pengetahuan yang minim mengakibatkan kader Posyandu tidak memberikan pelayanan secara khusus kepada lansia penyandang disabilitas

c. Kader Posyandu belum mendapatkan pelatihan dalam menangani lansia disabilitas

   Kader Posyandu belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai disabilitas. Hal ini mengakibatkan rendahnya kapasitas kader Posyandu dalam menangani disabilitas

2) Dampak Masalah

a. Lansia disabilitas tidak terlayani dengan baik

   Pelayanan yang diberikan kepada lansia disabilitas tidak maksimal karena lansia disabilitas hanya mendapatkan pelayanan umum yang diberikan kepada lansia secara umum. Sehingga hal ini berdampak pada rendahnya lansia disabilitas yang mengikuti posyandu.

b. Lansia penyandang disabilitas tidak terjamin kesehatannya

Tidak berjalannya pelayanan kepada lansia disabilitas mengakibatkan tidak terjaminnya kesehatan lansia penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan minimnya akses bagi lansia penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

c. Lansia disabilitas tidak mendapatkan pelayanan secara khusus
Lansia penyandang disabilitas tidak hanya memerlukan pelayanan seperti pemeriksaan gula darah kolesterol dan tekanan darah. Penanganan penyandang disabilitas memerlukan pelayanan secara khusus seperti skrining PTM, penyakit resiko disabilitas dan alat bantu disabilitas.

3) Fokus Masalah/masalah inti/masalah utama

Setelah mendapatkan informasi dari berbagai pihak serta observasi lapangan yang dilakukan dengan mempertimbangkan pada penyebab utama yaitu kurangnya kapasitas dari kader Posyandu dalam menangani disabilitas.

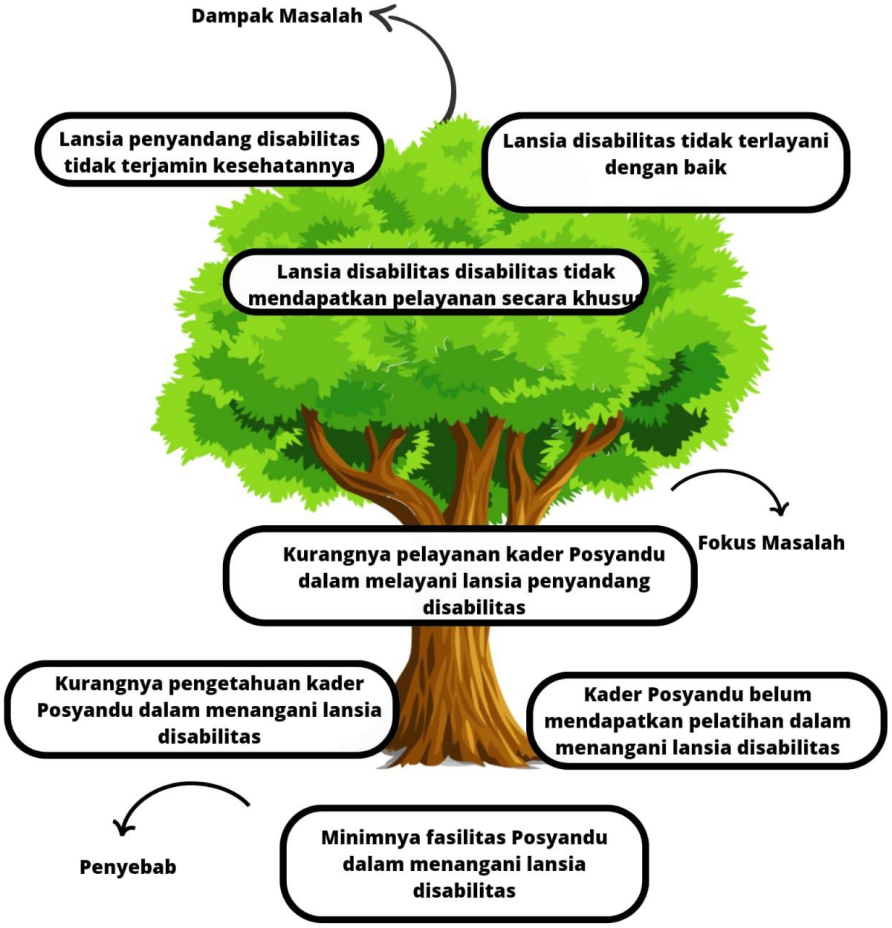

Gambar 2. 3 Analisis Pohon Masalah Isu Pemberdayaan Sosial

Melihat pada penyebab masalah yang dikaji melalui pohon masalah yang mana penyebab utama masalah ini yaitu ini yaitu kantor Posyandu belum pernah mendapatkan pelatihan dalam menangani lansia disabilitas. Penyebab lain mengenai isu ini yaitu kurangnya pengetahuan kader Posyandu dalam menangani lansia disabilitas. Maka diperlukan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader posyandu.

b. Identifikasi Kebutuhan

Kebutuhan lansia disabilitas di kelurahan rancanumpang sebagai berikut:

1) Pelayanan khusus kepada lansia disabilitas
   Pelayanan khusus yang dimaksud adalah seperti pemeriksaan skrining PTM, penyakit resiko disabilitas dan penyediaan alat bantu disabilitas.
2) Adanya dana operasional yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan posyandu lansia.
   Dalam kegiatan operasionalnya Posyandu lansia memerlukan anggaran dana yang cukup besar.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial asset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Alan Pincus dan Minahan (1973:4) membagi ruang lingkup sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi tiga:

1) Sumber informal
   Sumber informal dapat berupa keluarga, teman, tetangga, orang lain yang bersedia membantu, dukungan emosional, kasih sayang, informasi, dan pelayanan konkrit lainnya. Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan yaitu keluarga dari pihak masyarakat lansia lansia penyandang disabilitas di kelurahan rancanumpang dan masyarakat sekitar.
2) Sumber formal
   Sumber formal merupakan suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sumber formal yang dapat dimanfaatkan yaitu pekerja sosial yang berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat, pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu
3) Sistem sumber kemasyarakatan

Sistem sumber ini berupa Dinas Kesehatan kota Bandung dan Puskesmas Pembantu "Cempaka Arum" sebagai fasilitator dan edukator dalam pelaksanaan posyandu lansia disabilitas.

4. Rencana Intervensi

a. Latar belakang

Posyandu Lansia merupakan salah satu pelayanan bagi masyarakat lanjut usia yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan mewujudkan masa tua yang bahagia, sehat, mandiri dan berdaya guna. Program dan layanan Posyandu Lansia dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Tetapi perlu pelayanan khusus kepada lansia penyandang disabilitas karena lansia Penyandang disabilitas memiliki kerentanan lebih besar terhadap masalah kesehatan, memerlukan perawatan spesialis dan rehabilitasi untuk mengatasi gangguan yang sedang berlangsung. Tetapi pelayanan kepada lansia Penyandang disabilitas ini tidak maksimal dikarenakan kurangnya kapasitas dari kader Posyandu mengenai disabilitas. Oleh karena itu, praktikan merancang rencana intervensi untuk meningkatkan kapasitas kader posyandu dalam melayani lansia disabilitas.

b. Tujuan umum dan khusus

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari pelaksanaan program yaitu agar kader Posyandu dapat memberikan pelayanan secara khusus kepada lansia penyandang disabilitas yang ada di kelurahan rancanumpang.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari program ini yaitu:

1) Meningkatkan pengetahuan kader Posyandu dalam melayani lansia disabilitas.
2) Meningkatkan pelayanan yang diberikan posyandu kepada lansia penyandang disabilitas.
3) Meningkatkan kemampuan kader Posyandu dalam menangani lansia penyandang disabilitas

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program yang akan dilakukan adalah Program "Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia Dalam Menangani Lansia Penyandang Disabilitas"

Bentuk Kegiatan yang akan dilakukan adalah

1) Kegiatan Pelatihan untuk menjalankan fungsi sosial kader pkk secara maksimal yang ditujukan kepada penyandang disabilitas di Kelurahan Rancanumpang.

2) *Focus Group Discussion* (FGD)

Diskusi merupakan salah satu bentuk komunikasi di dalam kelompok. Pada diskusi ini diharapkan kader Posyandu, masyarakat,lansia disabilitas serta keluarga lansia menyampaikan apa saja yang menjadi ide, saran, dan masukan untuk perkembangan Posyandu.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan menurut Netting (2004) adalah orang yang terlibat atau dilibatkan dalam perubahan dan memiliki peran penting dalam menunjang program. Sistem partisipan yang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

1) Sistem inisiator (Inisiator system)
   Sistem inisiator adalah mereka yang pertama kalinya mengenai adanya suatu masalah dan memiliki inisiatif untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun orang yang mengenali adanya masalah yaitu pekerja sosial.
2) Sistem pelaku perubahan (change agent system)
   Sistem pelaku perubahan adalah sekelompok orang bertanggungjawab mengkoordinir program. Adapun sistem pelaku perubahan adalah pekerja sosial.
3) Sistem klien (client system)
   Sistem klien merupakan orang yang menjadi penerima manfaat langsung jika program ini terlaksana. Adapun sistem klien pada program ini adalah kader Posyandu
4) Sistem pengawasan (controlling system)
   Sistem pengawasan terdiri dari seseorang atau kelompok yang memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam memberikan perintah dan menyetujui keputusan pelaksanaan program. Adapun sistem pengawasan dalam program ini adalah Pekerja sosial dan Puskesmas Pembantu "Cempaka Arum".
5) Sistem sasaran (target system)
   Sistem sasaran dalam program ini adalah kader Posyandu Kelurahan rancanumpang.
6) Sistem kegiatan (action system)
   Sistem kegiatan adalah sejumlah orang maupun lembaga yang melakukan kegiatan bersama-sama dalam upaya pencapaian tujuan upaya

pertolongan, maka sistem kegiatan ini adalah pekerja Sosial,Kader Posyandu, dan Puskesmas Pembantu "Cempaka Arum".

7) Sistem pendukung (support system)
   Sistem dukungan yaitu orang atau kelompok yang dapat memberikan andil serta diharapkan dapat terlibat dan mendukung dalam pelaksanaan program ini. Adapun sistem dukungan dalam program ini adalah Ibu PKK.
8) Sistem pelaksana (implementing system)
   Sistem ini merupakan sekelompok orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program. Adapun sistem pelaksana program ini adalah pekerja sosial dan Dinas Kesehatan kota Bandung.

Tabel 2. 8 Sistem Partisipan "Program Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia Dalam Menangani Lansia Penyandang Disabilitas"

No	**Sistem**	**Partisipan**
1	Inisiator system	Pekerja sosial
2	change agent system	Pekerja sosial
3	client system	Kader Posyandu
4	controlling system	Pekerja sosial dan Puskesmas Pembantu "Cempaka Arum"
5	target system	Kader Posyandu
6	action system	Dinas kesehatan kota Bandung
7	support system	Ibu PKK
8	implementing system	Pekerja sosial dan Dinas Kesehatan kota Bandung

e. Metode dan Teknik

Dalam Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan Program yaitu dengan menggunakan Community Organization/Community Development (CO/CD). Community Organization yaitu suatu proses intervensi yang dilakukan dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana.

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah

1. penyuluhan sosial. Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah dengan penyuluhan sosial. Menurut Permensos No 10 tahun 2014, Penyuluhan sosial adalah sebuah proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran,sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan Kapasitas (capacity building)
   Yaitu merupakan teknik yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan baik individu, kelompok, masyarakat maupun lembaga sosial dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan perilaku

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam program ini adalah sebagai berikut

Tabel 2. 9 Rencana Anggaran Biaya Program Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia Dalam Menangani Lansia Penyandang Disabilitas

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	Print Proposal	2	paket	10.000	20.000
	Surat Undangan	60	lembar	200	12.000
	ATK	1	paket	25.000	25.000
	Banner	2x4	meter	25.000	25.000
	Jumlah I				82.000
2.	Honor				
	Honor Pemateri	1	orang/jam	400.000	400.000
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	50	Box	5.000	250.000
	Snack pemateri	1	Box	10.000	10.000
	Jumlah II				260.000
	Jumlah Keseluruhan				742.000

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis kelayakan dalam program ini menggunakan metode SWOT

Matriks 2.3 Analisis SWOT Program Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia Dalam Menangani Lansia Penyandang Disabilitas

	KEKUATAN (*STRENGTH*)	KELEMAHAN (*WEAKNES*)
SWOT	• Adanya kebutuhan lansia penyandang disabilitas berupa layanan pemeriksaan kesehatan khusus yang harus dipenuhi • Adanya keinginan kader posyandu untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan	• Kurangnya biaya operasional yang dimiliki oleh posyandu lansia kelurahan Rancanumpang • rendahnya pengetahuan dan kemampuan kader posyandu dalam menangani disabilitas
PELUANG (*OPPORTUNITY*)	SO	WO
• Adanya Dukungan dari keluarga yang memiliki lansia penyandang disabilitas di keluarga nya • Adanya Dukungan dari Dinas Kesehatan kota Bandung dalam pelaksanaan program	Mengundang ahli dalam memberikan pelatihan kepada kader Posyandu	Melakukan penggalangan dana rutin untuk biaya operasional Posyandu lansia
TANTANGAN (*THREAT*)	ST	WS
Kader posyandu kesulitan dalam mempraktikkan pelatihan yang telah diberikan	Memberikan pelatihan kepada kader posyandu secara rutin	Memberikan pelatihan yang mudah untuk dipahami dan dipraktekkan oleh kader posyandu

h. Jadwal dan Langkah-langkah

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 3 yaitu tahap persiapan, pelaksanaan program, dan pengakhiran dengan rincian sebagai berikut:

1. Persiapan

a. Membentuk kepanitiaan Kepanitiaan ini terdiri dari Pekerja Sosial sebagai koordinator dan anggota kepanitiaan lain diambil dari anggota PKK

b. Melakukan rapat mengenai konsep kegiatan dan penjadwalan
Kegiatan rapat ini dilakukan dengan pekerja sosial bersama dengan panitia serta Kader Posyandu dengan membahas konsep kegiatan dan bagaimana alur kerja beserta dengan penjadwalannya. Disini juga dibahas, kegiatan apa saja yang akan dilakukan selama program lalu materi apa saja yang sekiranya akan disosialisasikan kepada target sistem.

c. Panitia menyatakan komitmen
Kegiatan ini dilakukan dengan mengungkapkan janji hati dan sumbangkan apa yang dapat diberikan dalam menunjang kelancaran kegiatan yang akan direncanakan bersama

2. Tahap Pelaksanaan

Tabel 2. 10 Tahapan Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Lansia Dalam Menangani Lansia Penyandang Disabilitas

No	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Materi	Narasumber
1.	09.00- 09.20	Pembukaan	Sie. Acara	Sambutan	Puskesmas Cempaka Arum
2.	09.20- 10.00	Pemamparan materi	Sie. Acara	Pelatihan	Dinas Kesehatan kota Bandung
3.	10.00- 10.15	Ice breaking	Sie. Acara	Games	Sie. Acara
4.	10.15- 11.00	Pelatihan	Sie. Acara	Pelatihan	Dinas Sosial
5.	11.00- 11.35	Diskusi	Sie. Acara	Tanya jawab	Dinas Sosial
6.	11.35- 11.45	Penutupan	Sie. Acara	Foto bersama	-

3. Pengakhiran

1) Evaluasi Kegiatan

Evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur bagaimana keberhasilan suatu program. Evaluasi dalam program "Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan" penting karena sebagai suatu proses yang mengkaji secara kritis program, aktivitas, kebijakan, atau semacamnya. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kegiatan dan hasil program. Tujuannya untuk membuat penilaian tentang suatu program, meningkatkan efektivitasnya, dan untuk pertimbangan keputusan.

Evaluasi dalam program ini dilakukan dengan pembuatan angket yang disebarkan kepada *ex* partisipan program beberapa hari setelah program dilaksanakan. Pembagian kuesioner dilakukan oleh humas, sama seperti pada saat membagikan surat undangan

Selain itu evaluasi dari program ini juga dilihat dari seberapa tinggi tingkat partisipasi peserta dalam mendaftarkan dirinya untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk mengetahui program dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Rancanumpamg

2) Pembuatan laporan pertanggungjawaban dan pembubaran panitia

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) adalah laporan dalam bentuk dokumen tertulis untuk melaporkan pelaksanaan sebuah kegiatan. Fungsi dari laporan pertanggungjawaban adalah sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.

Nantinya, hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas kegiatan di masa mendatang. Di dalam laporan pertanggungjawaban juga memuat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana.

Laporan pertanggungjawaban penting karena sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan kewajiban dari panitia kepada pihak kelurahan Rancanumpang setelah menjalankan Program "Sosialisasi dan Pendampingan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan"

Setelah kegiatan evaluasi selesai, selanjutnya yaitu membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi tentang laporan pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengakhiran. Laporan tersebut diberikan kepada Lurah. Setelah semua tugas dan kegiatan sudah dilaksanakan sepenuhnya, maka panitia dibubarkan.

D. Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial

PENYULUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN HASIL LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA DI MASYARAKAT KELURAHAN RANCANUMPANG

1. Gambaran Umum Masalah

Limbah cair domestik atau air limbah rumah tangga merupakan buangan manusia (tinja dan air seni) dan sullage, yaitu air limbah yang dihasilkan kamar mandi, pencucian pakaian dan alat-alat dapur serta kegiatan rumah tangga lainnya (Sugiharto, 1987). Air limbah rumah tangga dapat dibagi menjadi air buangan dan limbah. Air buangan terdiri dari buangan bak mandi, mesin cuci, dan westafel dapur sedangkan air limbah terdiri dari pembuangan toilet. Air buangan jauh lebih tercemar daripada air limbah dan menyumbang sekitar 75-90% dari air limbah rumah tangga (Herma et.al, 2011).

Air limbah rumah tangga mengandung bahan kimia yang digunakan dalam aktivitas rumah tangga dan harus diolah agar tidak mencemari dan tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan (Alfrida, et.al, 2016). Untuk mengurangi dampak negatif tersebut maka perlu suatu upaya pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan, salah satunya dengan membuat instalasi pengolahan air limbah komunal (Sri, 2009).

Menurut Laporan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2020 menunjukkan, lebih dari separuh rumah tangga atau 57,42% di Indonesia membuang air limbah mandi, mencuci, dan dapur ke got/selokan/sungai. Selain itu, sebanyak 18,71% membuang limbah rumah tangga ke lubang tanah. Ada juga 10,26% orang Indonesia yang membuang limbah ke tangki septik. Berikutnya, 1,67% orang Indonesia membuang limbah rumah tangga ke sumur resapan. Namun, hanya ada 1,28% yang membuang limbah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) IPAL atau Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL

Masyarakat Kelurahan Rancanumpang sebagian besar tidak memiliki sumur resapan yang bertujuan untuk mengolah air limbah rumah tangga. Sehingga untuk pembuangan air limbah rumah tangga masyarakat Rancanumpang membuang hasil air limbah rumah tangganya ke sungai. Perilaku yang salah ini dilakukan sudah sejak lama oleh masyarakat Rancanumpang. Hal ini karena masyarakat rancanumpang tidak tahu bagaimana mengelola hasil air limbah rumah tangga yang benar. Akibat dari perilaku masyarakat rancanumpang yang salah membuat sungai menjadi tercemar. Sungai yang tercemar dapat membahayakan masyarakat

rancanumpang karena dapat menjadi sumber penyakit dan mengakibatkan langkanya air bersih. Oleh karena itu, praktikan mencari solusi untuk penanganan yang tepat dalam menghadapi hal tersebut.

2. Tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih

a. **Kajian Tentang Lingkungan**

1. Pengertian Lingkungan

Menurut Otto Soemarwoto, pengertian lingkungan adalah seluruh benda dan kondisi yang terdapat di dalam ruang yang ditempati oleh manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan menurut Emil Salim, arti lingkungan adalah semua benda, keadaan, kondisi, dan juga pengaruh yang ada di dalam ruangan yang saat ini ditempati serta mempengaruhi kehidupan, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan.

Secara umum, pengertian lingkungan adalah keseluruhan kondisi fisik suatu kawasan yang mencakup keadaan sumber daya alam (tanah, air, mineral, energi surya, flora, fauna), termasuk kelembagaan yang mencakup hasil ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

2. Jenis-Jenis Lingkungan

Secara umum, lingkungan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan.

a. Lingkungan Alami

Lingkungan alami adalah suatu lingkungan yang terbentuk dari proses alam dimana dalam perkembangannya belum mengalami pembaruan oleh manusia. Proses alam tersebut mencakup ekosistem dan semua komponen yang ada di dalamnya, baik itu fisik maupun biologi. Dalam hal ini, lingkungan alami muncul secara dinamis tanpa campur tangan manusia secara sengaja. Beberapa contoh lingkungan hidup alami, seperti; hutan, lembah, bukit, gunung, laut, rawa, dan lain sebagainya.

b. Lingkungan Buatan

Lingkungan buatan adalah suatu lingkungan yang terbentuk karena ada campur tangan manusia secara sengaja. Umumnya lingkungan buatan ini diciptakan manusia dengan menggunakan pengetahuan dan bantuan teknologi modern. Tujuan dibuatnya lingkungan ini adalah agar dapat ditempati oleh organisme, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Beberapa contoh lingkungan buatan; perkampungan, sekolah, taman bermain, waduk, taman, pasar, dan lain sebagainya.

3. Unsur-Unsur Penyusun Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Adapun beberapa unsur penyusun lingkungan yaitu :

a. Unsur Lingkungan Biotik

   Lingkungan biotik adalah komponen lingkungan hidup yang terdiri dari berbagai jenis organisme atau makhluk bernyawa yang ada di muka bumi (manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme).

b. Unsur Lingkungan Abiotik

   Lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang memberikan manfaat dan mempengaruhi kehidupan organisme (tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya matahari, dan lainnya).

c. Unsur Lingkungan Sosial Budaya

   Lingkungan sosial budaya merupakan lingkungan yang terbentuk dari semua aktivitas sosial dan kebudayaan yang dilakukan oleh manusia yang tersusun membentuk suatu sistem (gagasan, nilai, norma, dan lainnya).

4. Penyebab Kerusakan Lingkungan

Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat terjadi karena faktor alami dan faktor buatan. Faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan yaitu :

a. Faktor Alam

   Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena adanya bencana alam, seperti; tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, kemarau panjang, badai, dan lain-lain. Meskipun dapat diprediksi, peristiwa alam tersebut tidak dapat dicegah karena merupakan fenomena alam.

b. Faktor Buatan

   Kerusakan dan pencemaran lingkungan karena faktor buatan umumnya dilakukan oleh manusia. Adanya keinginan manusia untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dengan mengambil kekayaan alam dapat menimbulkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Eksploitasi SDA tersebut pada akhirnya akan merusak dan mencemari lingkungan hidup serta mengganggu keseimbangan ekosistem.

b. Kajian Limbah

1. Definisi Limbah

Limbah adalah bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah adalah sisa produksi baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Beberapa pengertian tentang limbah:

a. Berdasarkan keputusan Menperindag RI No. 231/MPP/Kep/7/1997 Pasal I tentang prosedur impor limbah, menyatakan bahwa Limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya.
b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18/1999 Jo.PP 85/1999 Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan/atau kegiatan manusia.

Limbah cair atau buangan merupakan air yang tidak dapat dimanfaatkan lagi serta dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap manusia dan lingkungan. Keberadaan limbah cair tidak diharapkan di lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Pengolahan yang tepat bagi limbah cair sangat diutamakan agar tidak mencemari lingkungan (Mardana, 2007)

2. Sumber Limbah Cair

Sumber air limbah dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Air limbah domestik atau rumah tangga

Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003, limbah cair domestik adalah limbah cair yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Air limbah domestik mengandung berbagai bahan, yaitu kotoran, urine, dan air bekas cucian yang mengandung deterjen, bakteri, dan virus (Eddy, 2008).

b. Air limbah industri

Air yang dihasilkan oleh industri, baik akibat proses pembuatan atau produksi yang dihasilkan industri tersebut maupun proses lainnya (Darmono, 2001). Limbah non domestik adalah limbah yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, transportasi, dan sumber-sumber lain (Eddy, 2008).

3. Limbah Cair Domestik

Limbah cair domestik adalah air yang telah dipergunakan dan berasal dari rumah tangga atau pemukiman termasuk di dalamnya adalah yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci, WC, serta tempat memasak (Sugiharto, 2008).

Komposisi limbah cair rata-rata mengandung bahan organik dan senyawa mineral yang berasal dari sisa makanan, urin, dan sabun. Sebagian limbah rumah tangga berbentuk suspensi lainnya dalam bentuk bahan terlarut.

Limbah cair ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu limbah cair kakus yang umum disebut black water dan limbah cair dari mandi-cuci yang disebut grey water. Black water oleh sebagian penduduk dibuang melalui septic tank, namun sebagian dibuang langsung ke sungai, sedangkan gray water hampir seluruhnya dibuang ke sungai-sungai melalui saluran (Mara, 2004).

4. Dampak Limbah Cair Domestik

Beberapa masalah yang dapat ditimbulkan oleh buangan limbah cair domestik antara lain:

a. Merusak keindahan atau estetika karena pemandangan menjadi tidak sedap dan berbau busuk.
b. Menimbulkan kerusakan lingkungan.
c. Merusak dan membunuh kehidupan di dalam air.
d. Membahayakan kesehatan.

Masuknya air limbah domestik ke dalam lingkungan perairan akan mengakibatkan perubahan-perubahan besar dalam sifat fisika, kimia, dan biologis perairan tersebut seperti suhu, kekeruhan, konsentrasi oksigen terlarut, zat hara, dan produksi dari bahan beracun. Tingkat dan luas pengaruh yang ditimbulkan terhadap organisme perairan tersebut sangat tergantung dari jenis dan jumlah bahan pencemar yang masuk ke perairan. Berubahnya keseimbangan antara faktor fisika-kimia dan biologis dalam suatu lingkungan akibat adanya senyawapencemar dapat mempengaruhi organisme dalam lingkungan tersebut.

3. Asesmen

1. Identifikasi Masalah.

Menurut informasi yang didapatkan oleh praktikan dari Ibu Susi selaku Ketua RW 01 Kelurahan Rancanumpang, seluruh masyarakat rancanumpang membuang hasil limbah cair rumah tangganya melalui got atau saluran air yang diarahkan menuju ke sungai. Perilaku membuang hasil limbah cair rumah tangga ke sungai ini dianggap wajar dan biasa oleh masyarakat Kelurahan rancanumpang. Selain itu menurut Teh Herti selaku staf kelurahan belum ada upaya yang dilakukan pemerintah kelurahan untuk mengubah perilaku masyarakatnya dalam mengelola limbah cair rumah tangga. Rendahnya kesadaran masyarakat kelurahan Rancanumpang mengenai

limbah cair rumah tangga dan pengelolaannya menyebabkan permasalahan ini menjadi permasalahan sosial di masyarakat kelurahan Rancanumpang.

2. **Penyebab Masalah**

a) Tidak adanya sumur resapan untuk pembuangan limbah rumah tangga

Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran dari masyarakat Kelurahan rancanumpang untuk pembangunan sumur resapan pembuangan limbah

b) Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya membuang limbah rumah tangga ke sungai

Rendahnya kesadaran ini dikarenakan masyarakat sudah menganggap bahwa membuang limbah cair rumah tangga ke sungai adalah hal yang biasa dan wajar.

c) Kurangnya pengetahuan ke masyarakat mengenai cara mengelola limbah rumah tangga yang benar

Kurangnya pengetahuan masyarakat disebabkan karenanya belum ada penyuluhan mengenai bagaimana mengelola limbah cair rumah tangga

3. Dampak Masalah

a) Sungai menjadi tercemar akibat limbah rumah tangga

Pembuangan limbah cair rumah tangga ke sungai membuat sungai menjadi tercemar karena tercampur oleh bahan kimia yang mengakibatkan sungai menjadi tidak bersih lagi

b) Berkurangnya ketersediaan air bersih

Pembuangan limbah cair rumah tangga ke sungai juga akan membuat ketersediaan air bersih yang ada untuk masyarakat Kelurahan Rancanumpang menjadi terbatas karena air sungai sudah tercemar oleh limbah cair rumah tangga

c) Timbulnya berbagai penyakit yang berkembang di air sungai yang tercemar

Pembuangan limbah cair rumah tangga mengakibatkan sungai tercemar sungai yang tercemar menjadi sarang penyakit patogen yang berbahaya bagi masyarakat sekitar. Hal ini berparah dengan keadaan Kelurahan rancanumpang yang sering mengalami banjir setiap tahunnya sehingga pada saat datang banjir air sungai yang tercemar keluar dan membanjiri rumah warga. Sehingga pada saat banjir surut lingkungan rumah warga Kelurahan Rancanumpang menjadu tercemar akibat air sungai yang tercemar.

4. Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Fokus masalah utama yang diambil pada kasus ini adalah kurang optimalnya pengelolaan hasil limbah rumah tangga cair oleh masyarakat. Sehingga focus masalah ini membutuhkan solusi yang harus dipecahkan

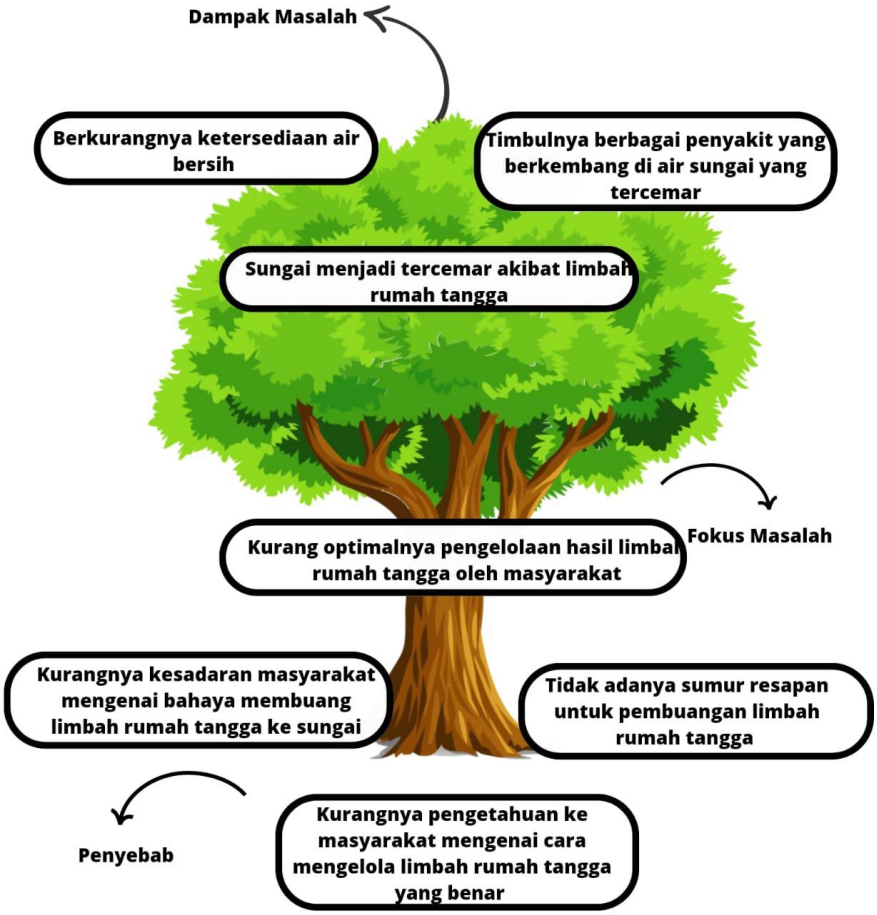

Gambar 2. 4 Analisis Pohon Masalah Isu Penataan Lingkungan Sosial

b. Identifikasi Kebutuhan

Kebutuhan masyarakat rancanumpang adalah

1) Sosialisasi pengelolaan limbah cair

   Masyarakat Kelurahan Rancanumpang memerlukan sosialisasi mengenai pengelolaan limbah cair. Hal ini bertujuan untuk mengubah kebiasaan dari masyarakat rancanumpang yang membuang limbah cair ke sungai

2) Pelatihan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

   Masyarakat kelurahan Rancanumpang membutuhkan pelatihan pengelolaan pengelolaan limbah cair rumah tangga yang benar.

3) Sarana Pengelolaan limbah cair

Masyarakat Kelurahan rancanumpang memerlukan adanya sarana seperti sumur resapan untuk pembuangan limbah cair masyarakat. Sarana sumber resapan ini bertujuan agar masyarakat Kelurahan rancanumpang tidak lagi membuang limbah cair rumah tangganya ke sungai.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial asset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Alan Pincus dan Minahan (1973:4) membagi ruang lingkup sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi tiga:

1) Sumber informal
   Sumber informal dapat berupa keluarga, teman, tetangga, orang lain yang bersedia membantu, dukungan emosional, kasih sayang, informasi, dan pelayanan konkrit lainnya. Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan yaitu pekerja sosial dan pegiat lingkungan.
2) Sumber formal
   Sumber formal merupakan suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka. Sumber formal yang dapat dimanfaatkan yaitu pekerja sosial dan anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). yang berperan sebagai fasilitator dan edukator bagi masyarakat.
3) Sistem sumber kemasyarakatan
   Sistem sumber ini berupa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung sebagai educator dan Pemerintah kelurahan Rancanumpang sebagai fasilitator dalam pengelolaan limbah cair rumah tangga.

4. Rencana Intervensi

a. Latar belakang

Kelurahan aja numpang adalah Kelurahan pertama di Bandung yang dimana 100% warganya sudah memiliki septic tank sendiri. Tetapi Berdasarkan dari Hasil asesmen di Kelurahan Rancanumpang, praktikan menemukan bahwa belum optimalnya pengelolaan limbah cair rumah tangga oleh masyarakat Kelurahan Rancanumpang. Masyarakat Rancanumpang membuang limbah cair rumah tangganya langsung ke sungai tanpa dikelola terlebih dahulu Oleh karena itu, praktikan merancang rencana intervensi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan limbah cair rumah tangga yang ada di Kelurahan Rancanumpang.

b. Tujuan umum dan khusus

Tujuan umum dari Program Penyuluhan pengelolaan limbah cair rumah tangga di Kelurahan rancanumpang adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya mengurangi permasalahan sungai tercemar di Kelurahan Rancanumpang

Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Program Penyuluhan pengelolaan limbah cair rumah tangga di Kelurahan Rancanumpang yaitu:

1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai pengolahan limbah cair rumah tangga
2) Menciptakan sungai yang bersih dan tidak tercemar

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Program yang diusulkan oleh praktikan yaitu Penyuluhan peningkatan kapasitas dalam mengelola limbah cair rumah tangga di Kelurahan Rancanumpang. Adapun beberapa kegiatannya sebagai berikut:

1. Penyuluhan pengelolaan limbah cair rumah tangga
   Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengolahan limbah cair rumah tangga dan mengubah kebiasaan masyarakat yang membuang limbah cair rumah tangganya ke sungai.
2. Pelatihan pengelolaan limbah cair rumah tangga
   Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat Kelurahan rancanumpang memiliki kemampuan untuk mengelola limbah cair rumah tangga yang benar.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan menurut Netting (2004) adalah orang yang terlibat atau dilibatkan dalam perubahan dan memiliki peran penting dalam menunjang program. Sistem partisipan yang dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

1) Sistem inisiator (Inisiator system)
   Sistem inisiator adalah mereka yang pertama kalinya mengenai adanya suatu masalah dan memiliki inisiatif untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun orang yang mengenali adanya masalah yaitu pekerja sosial.
2) Sistem pelaku perubahan (change agent system)
   Sistem pelaku perubahan adalah sekelompok orang bertanggungjawab mengkoordinir program. Adapun sistem pelaku perubahan adalah

pekerja sosial, pemerintah Kelurahan rancanumpang, dan pegiat lingkungan.

3) Sistem klien (client system)

   Sistem klien merupakan orang yang menjadi penerima manfaat langsung jika program ini terlaksana. Adapun sistem klien pada program ini adalah masyarakat kelurahan yang mendapatkan manfaat jika Program Penyuluhan peningkatan kapasitas dalam mengelola limbah cair rumah tangga dilaksanakan.

4) Sistem pengawasan (controlling system)

   Sistem pengawasan terdiri dari seseorang atau kelompok yang memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam memberikan perintah dan menyetujui keputusan pelaksanaan program. Adapun sistem pengawasan dalam Program Penyuluhan peningkatan kapasitas dalam mengelola limbah cair rumah tangga adalah kepala Kelurahan Rancanumpang.

5) Sistem sasaran (target system)

   Sistem sasaran dalam Program Penyuluhan peningkatan kapasitas dalam mengelola limbah cair rumah tangga adalah masyarakat Kelurahan Rancanumpang.

6) Sistem kegiatan (action system)

   Sistem kegiatan adalah sejumlah orang maupun lembaga yang melakukan kegiatan bersama-sama dalam upaya pencapaian tujuan upaya pertolongan, maka sistem Program Penyuluhan peningkatan kapasitas dalam mengelola limbah cair rumah tangga ini adalah Dinas Lingkungan kota Bandung.

7) Sistem pendukung (support system)

   Sistem dukungan yaitu orang atau kelompok yang dapat memberikan andil serta diharapkan dapat terlibat dan mendukung dalam pelaksanaan program ini. Adapun sistem dukungan dalam Program Penyuluhan peningkatan kapasitas dalam mengelola limbah cair rumah tangga adalah anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

8) Sistem pelaksana (implementing system)

   Sistem ini merupakan sekelompok orang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program. Adapun sistem pelaksana Program Penyuluhan peningkatan kapasitas dalam mengelola limbah cair rumah tangga adalah masyarakat kelurahan Rancanumpang, pemerintah Kelurahan rancanumpang, dan Dinas Lingkungan Kota Bandung

Tabel 2. 11 Sistem Partisipan Program Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Hasil Limbah Cair Rumah Tangga Di Masyarakat Kelurahan Rancanumpang

No.	Sistem	Partisipan
1	Initiator system	Pekerja Sosial
2	Change agent	Pekerja Sosial
3	Client System	Masyarakat kelurahan Rancanumpang
4	Support system	Dinas Lingkungan hidup kota Bandung
5	Controlling system	Kepala kelurahan Rancanumpang
6	Implementing system	Dinas lingkungan hidup dan kelurahan Rancanumpang
7	Target system	Masyarakat kelurahan Rancanumpang
8	Action system	Pekerja Sosial

e. Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan Program yaitu dengan menggunakan Community Organization/Community Development (CO/CD). Community Organization yaitu suatu proses intervensi yang dilakukan dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana. Metode ini digunakan untuk membantu masyarakat kelurahan Rancanumpang memahami pengelolaan limbah cair rumah tangga.

Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah dengan penyuluhan sosial. Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan program ini adalah dengan penyuluhan sosial. Menurut Permensos No 10 tahun 2014, Penyuluhan sosial adalah sebuah proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran,sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan

guna partisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam program ini, penyuluhan dilakukan bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai pengetahuan dan keterampilan manajemen keuangan

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Rencana anggaran biaya untuk program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 12 Rencana Anggaran Biaya Program Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Hasil Limbah Cair Rumah Tangga Di Masyarakat Kelurahan Rancanumpang

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	**Administrasi**				
	Proposal Pengajuan	50	Lembar	750	37.500
	Surat Menyurat	76	Lembar	750	57.000
	Jumlah I				94.500
2.	**Honorarium**				
	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung	1	Orang	500.000	500.000
	Jumlah II				500.000
3.	**Logistik**				
	Banner dan Spanduk 4X1	1	Buah	85.000	85.000
	Tempat Sampah	30	Buah	25.000	750.000
	Kabel Ties Isi 100	60	Pack	4.000	240.000
	Jumlah III				1.160.000
4.	**Konsumsi**				
	Snack Narasumber	2	Orang	10.000	20.000
	Snack Peserta	30	Orang	10.000	300.000
	Snack Panitia	10	Orang	10.000	100.000
	Snack Perwakilan Kelurahan	3	Orang	10.000	30.000
	Makan Siang Narasumber	2	Orang	20.000	40.000
	Makan Siang Peserta	30	Orang	15.000	450.000
	Makan Siang Panitia	10	Orang	15.000	150.000
	Makan Siang Poklisa	10	Orang	15.000	150.000
	Makan Siang Perwakilan Kelurahan	3	Orang	15.000	45.000
	Jumlah IV				1.385.000
	Jumlah Keseluruhan : 3.799.500				

g. Analisis Kelayakan Program

Analaisis kelayakan program menggunakan analisis SWOT

Matriks 2. 4 4 Analisis SWOT Program Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Hasil Limbah Cair Rumah Tangga Di Masyarakat Kelurahan Rancanumpang

	KEKUATAN (*STRENGTH*)	KELEMAHAN (*WEAKNESS*)
SWOT	Adanya kesadaran dari masyarakat terhadap keadaan air sungai yang sudah tercemar Adanya skill yang diterima masyarakat setelah mengikuti pelatihan	Masyarakat kesulitan dalam pelaksanaan praktik pelatihan di kehidupan sehari-hari
PELUANG (*OPPORTUNITY*)	SO	WO
Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengolahan limbah cair rumah tangga yang baik.	Memberikan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat kelurahan Rancanumpang tentang pengelolaan limbah cair rumah tangga yang benar	Melakukan pendampingan oleh pihak kelurahan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah cair rumah tangga
TANTANGAN (*THREAT*)	ST	WS
Kemungkinan peserta tidak datang mengikuti kegiatan karena terhalang dengan pekerjaan.	Menyelenggarakan kegiatan pada hari libur atau akhir pekan	Melakukan evaluasi dan monitoring dalam penerapan pengelolaan limbah cair rumah tangga

h. Jadwal dan Langkah-langkah

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal pelaksanaan program dengan tujuan memperoleh hasil yang maksimal. Tahapan ini dilakukan sebelum pelaksanaan inti program yang dilakukan melalui tahap berikut:

1) Tahap koordinasi

   Pada kegiatan koordinasi ini pekerja sosial melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup kota Bandung, dan PKK.

2) Pembentukan kepanitiaan

   Tahap ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat terkoordinasi dan terorganisir dengan baik. Kepanitiaan dibentuk berdasarkan hasil diskusi pihak yang terlibat dalam kegiatan. Kepanitiaan yang terbentuk hasil kesepakatan bersama sehingga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

3) Identifikasi Kebutuhan

   Identifikasi kebutuhan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan meliputi alat, sarana dan prasarana. Identifikasi ini memudahkan panitia dalam mempersiapkan kegiatan.

4) Penentuan peserta

   Peserta pada program ini adalah 10 orang dari tiap RW di kelurahan rancanumpang.

5) Menentukan jadwal pelaksanaan

   Panitia yang telah terbentuk membuat perencanaan program dengan menentukan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan pertama adalah pemaparan materi mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dengan estimasi waktu 60 menit. Kemudian, setelah kegiatan presentasi dilanjutkan dengan praktik bagi masyarakat dengan estimasi waktu 120 menit.

6) Membuat proposal kegiatan dan surat.

   Untuk surat kepada peserta, dicantumkan sebagai tujuan untuk Sosialisasi Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

7) Masing-masing panitia yang bersangkutan mengurus perizinan kegiatan.

8) Divisi sarana prasarana menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan

9) Humas menyebarkan surat-surat yang dibuat oleh sekretaris kepada peserta, perangkat kelurahan dan narasumber.

2. Tahap pelaksanaan

Tabel 2. 13 Tahapan Pelaksanaan Program Penyuluhan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Hasil Limbah Cair Rumah Tangga Di Masyarakat Kelurahan Rancanumpang

No	Waktu	Durasi	Acara	Pengisi Acara
1.	07.00-08.00	60’	Registrasi peserta	Disiapkan daftar hadir oleh divisi acara
2.	08.00-08.05	5’	Pembukaan acara	MC
3.	08.05-08.15	10’	Sambutan Kepala Kelurahan	Kepala kelurahan Rancanumpang
4.	08.15-08.25	10’	Sambutan ketua pelaksana	Koordinator
5.	08.30-10.00	90’	Penyuluhan Untuk Masyarakat Terkait Pengelolaan limbah cair rumah tangga	Dinas Lingkungan Hidup kota Bandung
6.	10.00-11.30	90’	Pelatihan pengelolaan limbah cair rumah tangga	Dinas lingkungan hidup kota Bandung
7.	11.30-11.35	05’	Penutupan	MC

3. Tahap pengakhiran

Tahap pengakhiran dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pengakhiran terdiri atas:

1) Evaluasi kegiatan

   Pada kegiatan ini, pelaksana program dan panitia melakukan kegiatan evaluasi terhadap proses untuk melihat tingkat kesuksesan proses pada setiap tahapan. Panitia akan membahas hambatan atau kendala yang dialami pada saat pelaksanaan kegiatan dalam program Pengelolaan limbah cair rumah tangga di kelurahan rancanumpang

2) Penyusunan laporan

   Kegiatan pelaporan merupakan tahapan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Seluruh panitia akan menyusun suatu laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban

E. Profil Analis Penanggulangan Bencana

PENGUATAN KAPASITAS ANGGOTA TAGANA DALAM KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KELURAHAN RANCANUMPANG.

1. Gambaran Umum Masalah

Taruna Siaga Bencana, selanjutnya disingkat TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. TAGANA ditetapkan dengan maksud untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana. TAGANA bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana. TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dan tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Kelurahan Rancanumpang sendiri memiliki organisasi Tagana di daerahnya. Tetapi dalam pelaksanaannya organisasi Tagana tahan lama tidak aktif selama 3 tahun. Hal ini bisa dilihat dari para anggota organisasi Tagana yang tidak pernah aktif lagi dan sudah tidak ada lagi kegiatan mengenai penanggulangan kebencanaan. Tentunya dengan tidak aktifnya organisasi Tagana ini menjadi salah satu masalah sosial yang harus diselesaikan karena tegangan adalah salah satu organisasi yang penting pada saat terjadi bencana.

2. Tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan yang dipilih

a. Konsep tentang Bencana

Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Faktor-faktor penyebab Bencana Menurut Nurjanah: 2012 terdapat 3 faktor penyebab terjadinya bencana, yakni:

1) Faktor alam (natural disaster) karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia.
2) Faktor non-alam (non-natural disaster) yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia.
3) Faktor sosial/manusia (man-made disaster) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi antara ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability). Ancaman bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Kerentanan terhadap dampak atau risiko bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu.

b. Konsep Tagana

Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Forum koordinasi Tagana adalah wadah kelembagaan tempat untuk bertukar informasi, pengalaman serta koordinasi kegiatan antar anggota Tagana yang terdiri dari forum Koordinasi Provinsi dan Forum koordinasi Kabupaten/kota. TAGANA pada hakekatnya adalah wadah berhimpun seluruh kekuatan komponen penanggulangan bencana berbasis masyarakat khususnya dari unsur generasi muda. Kata-kata Taruna memiliki arti generasi muda, kata Siaga memiliki arti segala upaya kesiapsiagaan dalam kondisi apapun dan kata Bencana adalah tantangan dan masalah yang harus diselesaikan.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI ingin mengakomodir potensi masyarakat yang telah membentuk organisasi, satuan-satuan atau kelompok Penanggulangan Bencana yang selama ini telah ada di Negara dengan berbagai nama dan atribut seperti dari Karang Taruna, Pecinta Alam, ORMAS, ORPOL, Organisasi Pemuda, Organisasi Profesi, Relawan dan lain-lain. Tujuan utama pemerintah untuk menyatukan mereka tidak bermaksud meniadakan organisasi induk yang sudah ada untuk berbuat menolong sesama tetapi untuk menyatukan visi, misi dan tindakan dalam Penanggulangan Bencana Indonesia dengan nama Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Tagana ditetapkan dengan maksud untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana, serta bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana. Tagana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada menteri sosial melalui Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. Dalam proses Kesiapsiagaan menanggulangi bencana, Tagana mengupayakan para anggotanya untuk mengikuti pelatihan, kursus dan simulasi. Proses ini dilakukan agar pada saat terjadi bencana pada anggota/relawan Tagana sudah siap dan tanggap dalam menjalankan pekerjaannya dalam bencana. TAGANA akan menjadi perekat dan pemersatu seluruh komponen dan unsur Penanggulangan Bencana yang berasal dari berbagai organisasi dan kelompok. Untuk itu organisasi atau komponen apapun yang terlibat dalam kebencanaan yang berasal dari unsur masyarakat di Indonesia sebaiknya tergabung dalam Korps yang sama yaitu TAGANA, sebab didalam TAGANA akan diberikan atribut yang sama, pengakuan berupa sertifikat, Nomor Induk Anggota dan Intensif serta aturan main yang sama di seluruh Indonesia sehingga eksistensinya diakui oleh negara (Fajar, 2017:23).

3. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan staf Kelurahan yaitu teh Herti diketahui bahwa kelurahan Rancanumpang memiliki organisasi Tagana. Tetapi beberapa tahun terakhir organisasi Tagana yang ada di kelurahan rancanumpang sudah tidak aktif. Hal ini bisa dilihat dari para anggota organisasi atau ganda yang sudah tidak berperan aktif dan sudah tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh Tagana dalam beberapa tahun terakhir. Dikarenakan sudah tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh Tagana dapat mengakibatkan kurangnya kapasitas dari para anggota Tagana.

Dengan sendiri merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang penting karena Kelurahan rancanumpang sendiri rawan akan bencana yaitu bencana banjir yang setiap tahunnya pasti melanda. Sehingga diperlukan peran aktifnya dari para anggota Tagana dalam pencegahan penanggulangan bencana.

b. Penyebab Masalah

Penyebab masalah kurangnya kapasitas anggota Tagana dalam menghadapi kebencanaan di Kelurahan Rancanumpang.

1. Minimnya pelatihan kesiapsiagaan bencana yang diberikan kepada anggota Tagana

   Pelatihan kesiapsiagaan bencana adalah salah satu hal yang wajib dan penting yang harus diberikan kepada anggota Tagana secara rutin hal ini untuk menguatkan kapasitas dari anggota Tagana
2. Rendahnya partisipasi aktif dari anggota Tagana

   Dalam kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana diperlukan peran aktif dari anggota Tagana. Tetapi di Kelurahan rancanumpang anggota Tagana sudah lama tidak aktif lagi
3. Kurangnya kesadaran dari anggota Tagana mengenai pentingnya organisasi Tagana

   Kurangi kesadaran dari anggota Tagana diakibatkan oleh para anggota sarjana yang menganggap bencana di kelurahan rancanumpang tidak terlalu serius sehingga tidak perlu ada kegiatan rutin untuk kesiapsiagaan dan rangka bencana.

c. Dampak Masalah

Dampak masalah dari kurangnya kapasitas anggota Tagana dalam menghadapi kebencanaan di Kelurahan Rancanumpang

1. Anggota Tagana tidak dapat mengenal potensi/kerugian yang timbul akibat bencana

   Dikarenakan sudah tidak aktif lagi para anggota Tagana mengakibatkan para penggolongan agama tidak lagi mengenali potensi-potensi yang timbul akibat bencana
2. Anggota Tagana kurang siap menghadapi bencana sehingga tidak dapat meminimalisir kerugian

   Minimnya kapasitas dari para anggota Tagana dapat mengakibatkan anggota Tagana tidak siap pada saat bencana datang yang akan mengakibatkan pada kerugian yang besar.

3. Anggota Tagana tidak dapat melaksanakan penanggulangan bencana.

   Minimnya pelatihan yang diberikan kepada anggota Tagana mengakibatkan anggota Tagana tidak bisa menjalankan fungsinya yaitu salah satunya adalah melaksanakan penanggulangan bencana.

d. Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka berdasarkan tingkat kepentingannya dan luasnya dampak yang dihasilkan maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fokus permasalahan adalah Kurangnya Kapasitas Anggota Tagana dalam Menghadapi Kebencanaan Di Kelurahan Rancanumpang

e. Analisis Pohon Masalah

Analisis Pohon masalah merupakan suatu alat atau Teknik pendekatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Analisis pohon masalah menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat dari beberapa faktor yang saling terkait. Praktikan menggunakan analisis pohon masalah untuk menganalisis hubungan sebab akibat dari masalah kurangnya kapasitas anggota Tagana dalam menghadapi kebencanaan di Kelurahan Rancanumpang.

Akar dalam pohon mengilustrasikan penyebab terjadinya permasalahan yangmana penyebab utama memunculkan penyebab masalah turunan. Adapun batang pohon mengilustrasikan fokus masalah yang dikaji. Lalu dampak permasalahan ini direpresentasikan dalam daun yang berbentuk miring untuk mengilustrasikan tingkatan dampak permasalahan dari yang terendah sampai yang tertinggi.

Fokus masalah yang dikaji dalam pohon masalah Kurangnya Kapasitas Anggota Tagana dalam Menghadapi Kebencanaan Di Kelurahan Rancanumpang. Penyebab utama masalah ini yaitu Minimnya pelatihan kesiapsiagaan bencana yang diberikan kepada anggota Tagana. Penyebab utama ini memunculkan penyebab lain yaitu rendahnya partisipasi anggota.

Dampak utama yang ditimbulkan yaitu Anggota Tagana tidak dapat mengenal potensi/kerugian yang timbul akibat bencana. Dampak lainnya yaitu Anggota Tagana kurang siap menghadapi bencana sehingga tidak dapat meminimalisir kerugian

Gambar 2. 5 Analisis Pohon Masalah Isu Penanggulangan Bencana

f. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab masalah maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah muatan kapasitas anggota Tagana dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Hal ini perlu untuk meningkatkan kapasitas dari anggota Tagana dan mengaktifkan kembali para anggota yang sudah lama tidak aktif

g. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber dalam kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial asset yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan

masalah dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Alan Pincus dan Minahan (1973:4) membagi ruang lingkup sistem sumber kesejahteraan sosial menjadi tiga:

1. Sumber informal
   Sumber informal dapat berupa keluarga, teman, tetangga, orang lain yang bersedia membantu, dukungan emosional, kasih sayang, informasi, dan pelayanan konkrit lainnya. Sistem sumber informal yang dapat dimanfaatkan yaitu pekerja sosial dan tokoh masyarakat.
2. Sumber formal
   Sumber formal merupakan suatu organisasi atau asosiasi formal yang bertujuan untuk meningkatkan minat anggota mereka Taruna Siaga Bencana (TAGANA) kota Bandung.
3. Sistem sumber kemasyarakatan
   Sistem sumber ini berupa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

4. Rencana Intervensi

a. Latar belakang

Organisasi Tagana adalah salah satu organisasi penting dalam kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Sehingga para anggota Tagana dituntut untuk memiliki kapasitas yang baik mengenai kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Di keluarga sendiri sering terjadi bencana yaitu bencana banjir setiap tahunnya. Sehingga diperlukan peran aktif Dari organisasi Tagana dalam kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

b. Tujuan umum dan khusus

Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam Program ini adalah meningkatkan kapasitas anggota Tagana dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan kemampuan anggota tegangan dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
2. Meningkatkan peran aktif dari para anggota Tagana

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Dalam program program peningkatan kapasitas anggota Tagana dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana ini, kegiatan yang akan dilakukan yaitu sosialisasi mengenai kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan pelatihan dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana

Materi pada kegiatan sosialisasi adalah konsep mengenai bencana,mitigasi bencana, kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana. Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para anggota Tagana.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan dalam program yang terkait dalam program ini adalah sebagai berikut

Tabel 2. 14 Sistem Partisipan Program Penguatan Kapasitas Anggota Tagana Dalam Kesiapsiagaan Dan Penanggulangan Bencana Di Kelurahan Rancanumpang

No.	Sistem	Partisipan
1	Initiator system	Pekerja Sosial
2	Change agent	Pekerja Sosial
3	Client System	Anggota Tagana kelurahan Rancanumpang
4	Support system	Tagana kota Bandung BPBD kota Bandung
5	Controlling system	Kepala kelurahan Rancanumpang
6	Implementing system	Karang Taruna dan Ibu PKK
7	Target system	Anggota Tagana Kelurahan rancanumpang
8	Action system	Pekerja Sosial

e. Metode dan Teknik

Metode yang akan digunakan dalam melaksanakan Program yaitu dengan menggunakan Community Organization/Community Development (CO/CD). Community Organization yaitu suatu proses intervensi yang dilakukan dalam rangka menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana. Metode ini digunakan untuk membantu anggota Tagana dalam meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Edukasi

Teknik edukatif merupakan salah satu usaha mempengaruhi khalayak dari suatu pernyataan pernyataan umum yang dilontarkan, dapat diwujudkan dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat-pendapat, fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman. Mendidik berarti memberikan sesuatu ide kepada khalayak apa sesungguhnya, di atas fakta-fakta, pendapat dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi kebenaran, dengan sengaja, teratur dan berencana, dengan tujuan mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan.

Tujuan dari teknik edukasi dalam Program Program Penguatan Kapasitas Anggota Tagana Dalam Kesiapsiagaan Dan Penanggulangan Bencana Di Kelurahan Rancanumpang adalah untuk mengubah pola pikir dari partisipan yaitu anggota Tagana agar lebih meningkatkan kesadaran dan pengetahuan anggota Tagana dalam mengenai kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Kelurahan Rancanumpang

2. Kampanye

Menurut Cangara (2011), kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi. Kampanye Sosial Adalah suatu kegiatan berkampanye yang mengkomunikasikan pesan-pesan yang berisi tentang masalah sosial kemasyarakatan, dana bersifat non komersil. Tujuan dari kampanye sosial adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan gejala-gejala sosial yang sedang terjadi. Tujuan dari teknik kampanye adalah untuk meningkatkan kesadaran dari anggota Tagana dalam pentingnya untuk aktif dalam kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana di Kelurahan Rancanumpang

f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan

Anggaran biaya yang diperlukan dalam selama kegiatan ini adalah sebagai berikut

Tabel 2. 15 Rencana Anggaran Biaya Program Penguatan Kapasitas Anggota

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	50.000	100.000
	Sound system	2	Unit	150.000	300.000
	Banner kegiatan	1	Meter	75.000	75.000
	Proyektor	1	Unit	150.000	150.000
	Layer proyektor	1	Unit	50.000	50.000
	Jumlah I				675.000
2.	Honorarium				
	BPBD Kota Bandung	1	Orang/jam	400.000	400.000
	TAGANA Kota Bandung	1	Orang/jam	400.000	400.000
	Jumlah II				800.000
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	60	Box	5.000	300.000
	Snack panitia	15	Box	10.000	150.000
	Snack narasumber	2	Box	20.000	40.000
	Jumlah III				490.000
	Jumlah Keseluruhan				1.965.000

g. Analisis Kelayakan Program

Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan program tertentu.

Matriks 2. 5 Analisis SWOT Program Penguatan Kapasitas Anggota Tagana

SWOT	KEKUATAN (*STRENGTH*)	KELEMAHAN (*WEAKNESS*)
	1. Adanya keinginan dari anggota Tagana untuk melakukan kegiatan rutin dalam kesiapsiagaan bencana 2. Terdapat urgensi yang dimana kelurahan Rancanumpang sering mengalami bencana rutin tiap tahun	1. Anggaran biaya yang besar 2. Anggota Tagana jarang mendapatkan pelatihan dalam menangani kebencanaan
PELUANG (*OPPORTUNITY*)	SO	WO
Adanya dukungan dari pihak kelurahan dan BPBD Kota Bandung dalam pelaksanaan program	-Melakukan kerjasama dengan BPBD Kota Bandung untuk memberikan pelatihan kebencanaan kepada anggota Tagana	Mengajukan proposal permohonan anggaran program yang ditujukan kepada kelurahan
TANTANGAN (*THREAT*)	ST	WT
Kegiatan kesiapsiagaan dan penanggulangan tidak rutin dilakukan oleh Tagana	Mengadakan agenda kegiatan rutin dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas anggota Tagana secara rutin

h. Jadwal dan Langkah-langkah

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal pelaksanaan program dengan tujuan memperoleh hasil yang maksimal. Tahapan ini dilakukan sebelum pelaksanaan inti program yang dilakukan melalui tahap berikut:

a) Tahap koordinasi

Pada kegiatan koordinasi ini pekerja sosial melakukan koordinasi dengan pihak Tagana Kota Bandung BPBD Kota Bandung, dan Dinas sosial.

b) Pembentukan kepanitiaan

Tahap ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat terkoordinasi dan terorganisir dengan baik. Kepanitiaan dibentuk berdasarkan hasil diskusi pihak yang terlibat dalam kegiatan. Kepanitiaan yang terbentuk hasil kesepakatan bersama sehingga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya kepanitiaan dalam program ini berasal dari karang taruna Kelurahan Rancanumpng dan Anggota Tagana Kelurahan Rancanumpang.

c) Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan meliputi alat, sarana dan prasarana. Identifikasi ini memudahkan panitia dalam mempersiapkan kegiatan.

d) Penentuan peserta

Peserta pada program Program Penguatan Kapasitas Anggota Tagana adalah anggota Tagana kelurahan Rancanumpang

e) Menentukan jadwal pelaksanaan

Panitia yang telah terbentuk membuat perencanaan program dengan menentukan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan pertama adalah pemaparan materi mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan dengan estimasi waktu 120 menit

f) Membuat proposal kegiatan dan surat.

Untuk surat kepada peserta, dicantumkan sebagai tujuan untuk Sosialisasi Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga.

g) Masing-masing panitia yang bersangkutan mengurus perizinan kegiatan.

h) Divisi sarana prasarana menyiapkan alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan

i) Humas menyebarkan surat-surat yang dibuat oleh sekretaris kepada peserta, perangkat kelurahan dan narasumber.

2. Tahap Pelaksanaan

Susunan tahap pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 16 Tahapan Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Anggota Tagana

No	Waktu	Durasi	Acara	Pengisi Acara
1.	08.30-09.00	30’	Registrasi peserta	Disiapkan daftar hadir oleh divisi acara
2.	09.00-09.05	5’	Pembukaan acara	MC
3.	09.05-09.15	10’	Sambutan Kepala Kelurahan	Kepala kelurahan Rancanumpang
4.	09.15-09.25	10’	Sambutan ketua pelaksana atau koordinator	Koordinator
5.	09.25-10.55	90’	Pelatihan kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Tagana kota Bandung
6.	10.55-12.00	65’	Sesi Diskusi	BPBD kota Bandung
7.	12.00-13.00	60’	Ishoma	-
8.	13.00-14.30	90’	Peningkatan Kapasitas dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Tagana
9.	14.30-14.50	20’	Sesi diskusi	Pekerja Sosial
10.	11.30-11.35	05’	Penutupan	MC

3. Tahap pengakhiran

Tahap pengakhiran dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan. Kegiatan pengakhiran terdiri atas:

1) Evaluasi kegiatan

Evaluasi merupakan kegiatan penting dalam menilai tingkat keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan. Pada kegiatan ini, pelaksana program dan panitia melakukan kegiatan evaluasi terhadap proses untuk melihat tingkat kesuksesan proses pada setiap tahapan.

2) Penyusunan laporan

Kegiatan pelaporan merupakan tahapan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Seluruh panitia akan menyusun suatu laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Praktikum I merupakan praktikum berbasis laboratorium. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial, mempraktikan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial dan memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial yang meliputi pendekatan awal, asesmen dan perencanaan intervensi.

Praktikum Laboratorium dilaksanakan di Kelurahan Rancanumpang Kota Bandung yang dimulai dari 25 Januari 2023. Kegiatan Praktikum dilakukan berdasar pada Lima Profil Lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu Analis Jaminan Sosial, Analis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial dan Analis Penanggulangan Bencana. Setiap profilnya praktikan diwajibkan untuk mencari isu-isu yang sesuai dengan topik profil lulusan program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data sekunder. Kemudian dilakukan asesmen dan menyusun rencana intervensi dari isu yang dipilih.

Praktik Profil Analis Jaminan Sosial dimulai pada tanggal 8 Februari 2023, diawali dengan pembekalan dari praktisi. Dalam Profil Analis Jaminan Sosial, praktikan memilih isu Rendahnya ke peserta BPJS ketenagakerjaan sektor pekerja informal. Tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan Rendahnya ke peserta BPJS ketenagakerjaan sektor pekerja informal, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah.

Dalam Profil Analis Jaminan Sosial praktikan menjadikan Topik Rendahnya kepesertaan BPJS ketenagakerjaan sektor pekerja informal sebagai fokus masalah. Setelah selesai melakukan asesmen praktikan menyusun rencana intervensi berupa program Peningkatan Kepesertaan Bpjs Ketenagakerjaan Pada Pekerja Sektor Informal Di Kelurahan Rancanumpang Pengetahuan Masyarakat terkait PBI-JKN melalui Sosialisasi Mekanisme Pendaftaran PBI-JKN Terintegrasi dengan DTKS di Kelurahan Rancanumpang..

Praktik Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial dimulai pada tanggal 22 Februari 2023. Diawali dengan pembekalan dari praktisi praktikan mengambil isu terkait Pemanfaatan Dana Program BPNT yang kurang sesuai dengan ketentuan. Tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan Pemanfaatan Dana Program BPNT yang tidak sesuai ketentuan, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah. Setelah selesai melakukan asesmen praktik menyusun rencana intervensi berupa kegiatan sosialisasi, yaitu Sosialisasi dan pendampingan KPM BPNT dalam pemanfaatan Dana BPNT.

Praktik Profil Analis Pemberdayaan Sosial dimulai pada tanggal 8 Maret 2023, diawali dengan pembekalan dari praktisi. Dalam profil pemberdayaan sosial, praktikan mengambil isu terkait lansia penyandang disabilitas di Kelurahan Rancanumpang. Tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan posyandu lansia, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam Profil Analis Pemberdayaan Sosial praktikan mengambil sebagai fokus masalah kurangnya kapasitas kaderi Posyandu dalam menangani lansia penyandang disabilitas. Setelah selesai melakukan asesmen, praktikan menyusun rencana intervensi berupa Peningkatan kapasitas kader Posyandu dalam menangani lansia penyandang disabilitas.

Praktik Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial dimulai pada tanggal 24 Maret 2023, diawali dengan pembekalan dari praktisi. Dalam profil penataan lingkungan sosial praktikan mengambil isu terkait Limbah Cair rumah tangga. Tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan Limbah Cair rumah tangga, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial praktikan mengambil fokus masalah yaitu Kurang optimalnya pengelolaan limbah cair rumah tangga oleh masyarakat. Setelah selesai melakukan asesmen, praktikan menyusun rencana intervensi berupa penyuluhan pengelolaan limbah cair rumah tangga yang benar.

Praktik Profil Analis Penanggulangan Bencana dilaksanakan pada

tanggal 5 April 2023. Diawali dengan pembekalan dari praktisi. Dalam profil analis penanggulangan bencana, praktikan mengambil isu terkait Tagana. Tahap selanjutnya praktikan melakukan asesmen terhadap isu tersebut mulai dari identifikasi masalah yang terkait dengan partisipasi Tagana, menentukan fokus masalah, mengidentifikasi penyebab masalah, mengidentifikasi dampak masalah, menganalisis kebutuhan penyelesaian masalah dan mengidentifikasi potensi dan sumber penyelesaian masalah. Dalam Profil Analis Penanggulangan Bencana praktikan mengambil minimnya kapasitas anggota Tagana dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Setelah selesai melakukan asesmen, praktikan menyusun rencana intervensi berupa Penguatan kapasitas Tagana dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

B. Rekomendasi

1. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Setelah pelaksanaan praktikum laboratorium yang dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari sampai 15 April 2023. Maka praktikan merasa memiliki beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan ataupun ditingkatkan oleh pihak program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial. Berikut ini adalah rekomendasi yang sekiranya dapat dipertimbangkan oleh program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan:

a) Pihak program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial diharapkan mengkaji ulang pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan bersamaan dengan pembelajaran kelas.

b) Pihak program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial diharapkan mengkaji ulang substansi pembekalan agar lebih relevan dengan profil lulusan program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial.

2. Politeknik Kesejahteraan Sosial

a) Pihak Politeknik Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat meningkatkan Kerjasama dalam penentuan jadwal sehingga dapat memaksimalkan kondisi Praktikum Laboratorium.

b) Pihak Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung diharapkan dapat mengutamakan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dalam pemilihan kasus yang ditangani oleh Sentra Layanan

DAFTAR PUSTAKA

Kontak banten. (2020). JKN KIS-PBI Dinonaktifkan, Warga Pandeglang Kebingungan https://www.kontakbanten.co.id/2020/01/jkn-kis-pbi-dinonaktifkan-warga.html?m=0 diakses 13 Februari 2023 jam 20.03 WIB

Redaksi 24.com. (2020). KIS Non Aktif, Bukan Kesalahan Puskesmas Menes Pandeglang. https://www.redaksi24.com/kis-non-aktif-bukan-kesalahan-puskesmas-menes-pandeglang/ diakses 13 Februari 2023 jam 20.12 WIB

Khoirunisa, Rizqia. (2019). Kartu BPJS Nonaktif karena data Ganda (double data) begini cara mengatasinya. http://www.pasienbpjs.com/2019/06/mengatasi-bpjs-nonaktif-kepesertaan-ganda.html diakses 13 Februari 2023 jam 21.45 WIB

Deepublish. https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-edukasi-adalah/ diakses 15 Februari 2023 jam 19.48 WIB

https://fasicha.com/2020/09/22/sbm-2021-11-honorarium-narasumber-moderator-pembawa-acara-panitia/ diakses 20 Februari 2023 jam 22.41 WIB

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/101600/pergub-prov-banten-no-33-tahun-2018 diakses 2 Maret 2023 jam 15.31 WIB

Bachtera, Mulya. (2013). Phon masalah (teknik riset)http://mulyabachteraarrayyan.blogspot.com/2013/10/pohon-masalah-teknik-riset.html diakses pada 22 Februari 2023 jam 22.31 WIB

Maha, Yurika. (2016). Sistem Sumber Menurut Allen Pincus and Anne Minahan http://yurikamaha.blogspot.com/2016/05/sistem-sumber-menurut-allen-pincus-and.html diakses pada 22 Februari 2023 jam 21.59 WIB

Peraturan Derah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2015. http://www.bphn.go.id/data/documents/15pdjateng006.pdf 11.30 WIB 12 Maret 2022 Nugroho, Hendri Setyo. (2020). https://surveymeter.org/id/node/571 22.30 WIB 13

Maret 2023

Jabarprov. (2020). Tingkatkan Kebahagiaan Para Lansia, TP PKK Jabar Perkuat

Program BKL https://jabarprov.go.id/index.php/news/39926/2020/11/02/Tingkatkan-Kebahagiaan-Para-Lansia-TP-PKK-Jabar-Perkuat-Program-BKL 22.36 WIB 13 Maret 2023

Website resmi desa gayam. (2021). Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) & Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) https://gayambjn.desa.id/artikel/2021/3/28/pkk-posyandu 22.54 WIB 13 Maret 2022

Abdalloh, Mildan. (2021). Penanganan Sampah di Kabupaten Bandung Timpang! https://www.ayobandung.com/soreang/pr-79726885/penanganan-sampah-di-kabupaten-bandung-timpang diakses pada 19.30 WIB 26 Maret 2023

Antara news. (2022). Sampah yang tak tertangani di Kabupaten Bandung capai 968 ton per hari. https://www.antaranews.com/berita/2664521/sampah-yang-tak-tertangani-di-kabupaten-bandung-capai-968-ton-per-hari diakses pada 19.43 WIB 26 Maret 2022 Gischa, Serafica. (2022). Masalah Sosial di Lingkungan tempat Tinggal.

https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/18/165321769/masalah-sosial-di-lingkungan-tempat-tinggal?page=all diakses pada 20.12 WIB 27 Maret 2022 Sustaination. (2021). Bahaya Sampah Organik, Ancaman Besar Bagi Bumi Kita!

https://sustaination.id/bahaya-sampah-organik/ diakses pada 20.16 WIB 27 Maret

2022

DLH Probolinggo. (2021). Pengolahan Sampah Organik dengan Maggot di TPA

Seboro. https://dlh.probolinggokab.go.id/pengolahan-sampah-organik-dengan-

maggot-di-tpa-seboro/ diakses pada 02.15 WIB 28 Maret 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1

Resume Pembekalan Profil Analis Jaminan Sosial

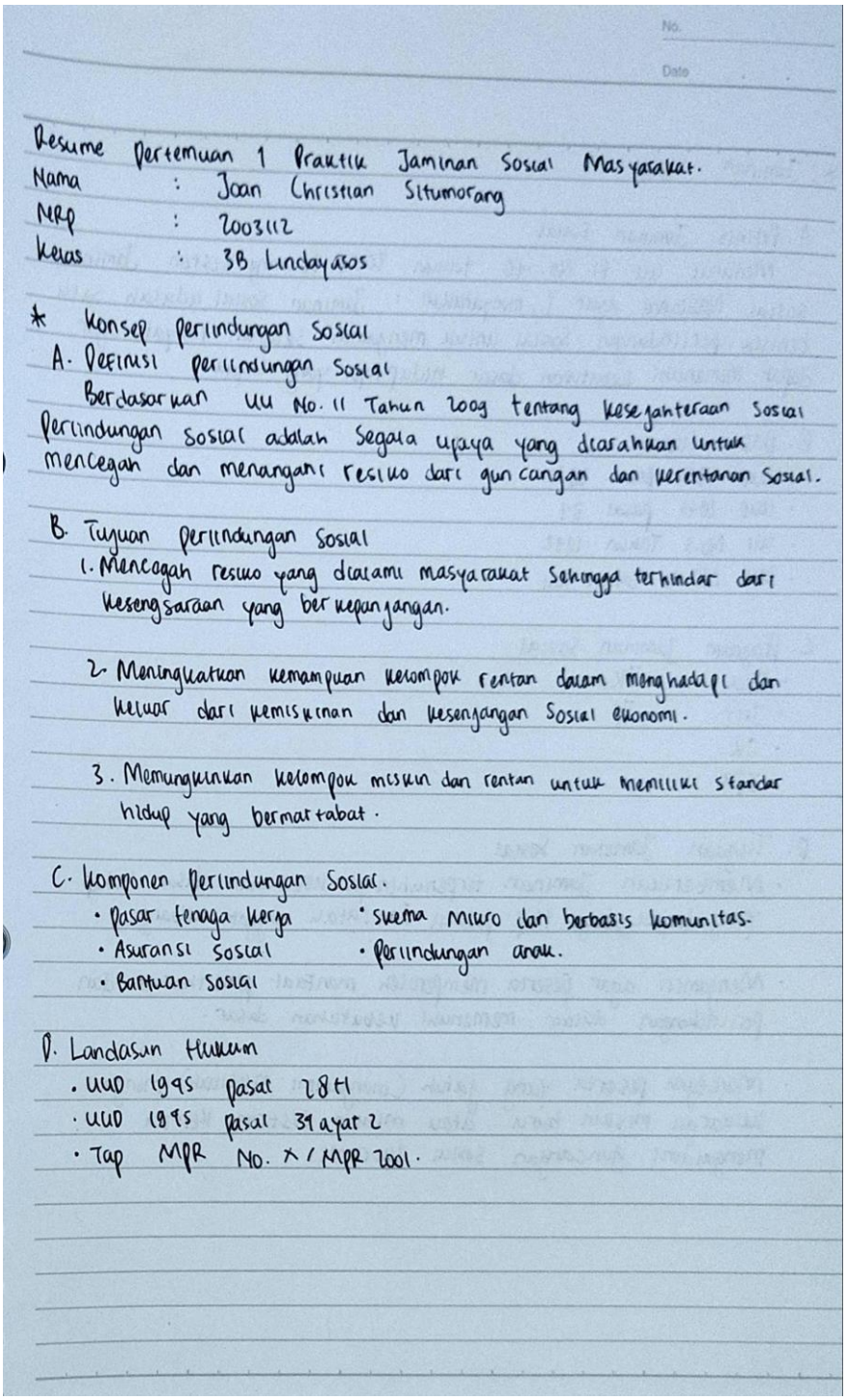

No.

Date

Resume Pertemuan 1 Praktik Jaminan Sosial Masyarakat.

Nama : Joan Christian Situmorang

NRP : 2003112

Kelas : 3B Lindayasos

* Konsep perlindungan Sosial

A. Definisi perlindungan Sosial

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial perlindungan sosial adalah segala upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

B. Tujuan perlindungan Sosial

1. Mencegah resiko yang dialami masyarakat sehingga terhindar dari kesengsaraan yang berkepanjangan.

2. Meningkatkan kemampuan kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi.

3. Memungkinkan kelompok miskin dan rentan untuk memiliki standar hidup yang bermartabat.

C. Komponen perlindungan Sosial.

- Pasar tenaga kerja
- Asuransi sosial
- Bantuan sosial
- Skema mikro dan berbasis komunitas.
- Perlindungan anak.

D. Landasan Hukum

- UUD 1945 pasal 28H
- UUD 1945 pasal 34 ayat 2
- Tap MPR No. X / MPR 2001.

No.

Date

*. Jaminan Sosial

A. Pefinisi Jaminan Sosial

Menurut UU RI No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ayat 1, menyatakan : Jaminan sosial adalah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

B. Dasar Hukum.

- UUD 1945 pasal 28 H
- UUD 1945 pasal 34
- UU No.3 Tahun 1992
- UU No.40 Tahun 2011

C. Program Jaminan Sosial

- JKK
- JKm
- JHT
- JP
- JK
- JPK

D. Tujuan Jaminan Sosial

- Memberikan Jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi tiap peserta dan/atau anggota keluarga.
- Menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Mencegah peserta yang jatuh (mengalami musibah) menjadi keluarga miskin baru atau miskin ekstrem ketika mengalami guncangan sosial ekonomi.

Lampiran 2

Resume Pembekalan Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

No.

Date

Resume materi Pembekalan SDBS

Nama : Joan Christian Situmorang
Kelas : 3B Lindayasos
NRP : 2003112

- Tiga Masalah dalam Organisasi Nirlaba.
  - Sumber Dana
  - Sumber Daya Manusia
  - Pengelolaan Keuangan.

- Dalam SDBS, kemitraan adalah hal utama yang bukan hanya hubungan saja, tetapi juga sebagai sesuatu langkah strategis.

- Masalah yang dalam kemitraan.
  - Masalah Non Teknis.
    1. kemitraan yang tidak setara.
    2. komunikasi dan koordinasi.
    3. kesenjangan pengetahuan.
    4. Perbedaan kultur organisasi.
    5. Insentif.

  - Masalah teknis.
    1. RAB.
    2. prosedur (pencairan dan pelaporan).
    3. pengauditan.

  - Komponen dalam Membangun Jaringan.
    1. Efisiensi dan efektifitas.
    2. Jaminan keberhasilan kerjasma (tidak meragukan)!
    3. Mempertimbangkan resiko dan keuntungan.
    4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan organisasi.
    5. Fokus pada orientasi manfaat sosial.
    6. pertimbangan kebercangutan dan pengembangan program.

No.

Date

- Tips Penggalangan Dana.
  1. Identifikasi Sumber dana
  2. Pertimbangkan peluang dan resiko
  3. Kreatif dalam penggalangan dana.
  4.

- Budgeting
  adalah proses penyusunan rencana sistematis yang meliputi seluruh kegiatan organisasi dalam periode tertentu.

- Komponen Budgeting.
  1. Pendapatan / Sumber dana.
     : Harus detail untuk penetapan prioritas bagi organisasi.

  2. Pengeluaran.
     : Pengelolaan harus tepat untuk mendapat keuntungan.

  3. Keuntungan
     : Perlu direncanakan untuk pengambilan keputusan strategis organisasi.

- Tahapan dalam Budgeting.
  1. Menentukan pedoman anggaran.
  2. Persiapan anggaran.
  3. penentuan anggaran.
  4. Pelaksanaan anggaran.

- Peran kelurahan.
  - Sebagai Wadah dari dana pemerintah.
  - Menetapkan sasaran.
  - Menyalurkan bantuan pada tepat sasaran.

Lampiran 3

Resume Pembekalan Profil Analis Pemberdayaan Sosial

No
Date

Nama : Joan Christian Situmorang
NRP : 2003112

Review Pembekalan Pemberdayaan.

- Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mengadikan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial).

- Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.
  - Pendekatan direktif (Instruktif)
    1. Peksos sudah tahu apa yang dibutuhkan
    2. Hasil yang didapat bersifat Fisik dan jangka pender.

  - Pendekatan non direktif (partisipatif).
    1. Peksos sebagai katalisator dan enabler
    2. Masyarakat sudah tau apa yang dibutuhkan
    3. Peksos mendorong masyarakat untuk self determination.

- Tahapan proses pemberdayaan.
  1. Assesmen : kebutuhan, sumber daya
  2. Perencanaan program : Melibatkan masyarakat dalam mengenali masalah dan pemecahan.
  3. Pemformulasi rencana aksi : Menentukan program dan kegiatan.
  4. Implementasi : Mengalankan program sesuai rencana.
  5. Evaluasi : Indikator keberhasilan.
  6. Terminasi : kemandirian masyarakat.

No
Date

- Bentuk pemberdayaan
  - Direct services
  - Capacity Building
  - Linking
  - Accesibility

- Permasalahan dan Solusi

1. Komunikasi dan koordinasi
   - Solusi : Pertemuan rutin, Monitoring

2. Kurangnya Informasi
   - Solusi : Mengumpulkan Informasi dengan detail dan jelas.

3. Kurangnya komitmen
   - Solusi : Membuat kesepakatan, Surat kesediaan dan penghargaan.

4. Nilai di Masyarakat yang kurang mendukung.
   - Solusi : Pendekatan persuasif dan bermitra dg tokoh masyarakat dan keagamaan.

5. Exit Strategy dan Sustainability
   - Solusi :
     - Capacity Building untuk Masyarakat.
     - Advokasi Stakeholder
     - Perencanaan exist strategy dari awal.

6. Birokrasi yang tidak mendukung.
   - Solusi :
     - Kontak Stakeholder terkait.
     - Penjelasan pentingnya program untuk Stakeholder.

Lampiran 4

Resume Pembekalan Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial

Nama : Joan Christian Situmorang
NRP : 2003112
Hari / tgl : Jumat, 24 Maret 2023

Pembekalan analis penataan Lingkungan Sosial.

- Pengertian lingkungan Sosial
  adalah keadaan sosial dan fisik langsung tempat orang mengalami kehidupan atau sesuatu terjadi atau berkembang.
  Domain pekasos adalah pada interaksi dan relasi antara orang dan lingkungan sosial.

- pekerja sosial & lingkungan
  Masalah sosial adalah masalah lingkungan. Pekerja sosial wajib memasukkan isu - isu lingkungan dalam intervensi sosial. Pekerjaan sosial yang memperhatikan aspek lingkungan yg diasosiasikan dengan istilah Green Social work (Dominelli, 2012) dan eco - social work (Peters, 2012).

- Tahapan kerja Bidang penataan Lingkungan Sosial
  - Identifikasi masalah.
  - Perencanaan : - Teori perubahan
    - Kerangka logis
  - Implementasi : - Pengembangan kapasitas Masyarakat.
    - Pengorganisasian.
    - Pengembangan ekonomi
    - Koalisi
    - Aksi politik dan sosial.
  - Evaluasi : - Formatif
    - Sumatif.

- Peran Pekerja sosial :
  1. Advocate
  2. Intiator
  3. Negotiator
  4. Consultant
  5. Mediator.

- Kompetensi pekerja sosial
  1. Pemberdayaan
  2. Pengembangan Masyarakat
  3. Membangun Tim
  4. Multi-level Assessment
  5. Intervensi Holistik
  6. Praktek Relasi.

- Peluang kerja sektor profit / non-profit.
  1. Bussines Development Manager.
  2. Program management
  3. Advocacy Advisor
  4. CSR Manager
  5. Consultant
  6. Monitoring, evaluation ~~at~~ and learning Manager.
  7. Goverment Relation Manager.
  8. Conflict Resolution Advisor.

Lampiran 5

Resume Pembekalan Profil Analis Penanggulangan Bencana

1). Bencana.

1. Konsep Bencana, korban bencana, Pengungsi.

- Konsep Bencana
  : Pertemuan antara Ancaman x Kerentanan = Bencana.

- Korban bencana
  : Orang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian secara Material, lingkungan dan sosial atau kehilangan jiwa akibat suatu peristiwa.

- Pengungsi
  : orang atau sekelompok yang meninggalkan suatu wilayah akibat suatu bencana.

- Managemen Bencana.
  - Pra Bencana : 1. pencegahan
    2. Mitigasi
    3. Rencana kontigensi
    4. kesiapsiagaan:
    5. peringatan Dini.
  - Saat Bencana : 1. Siaga Darurat
    2. Tanggap Darurat
    3. Transisi Darurat ke pemulihan.
  - Pasca Bencana : 1. Jitu pasna
    2. Rehabilitasi
    3. Rekonstruksi.

    → kajian kebutuhan pasca Bencana (asesmen).

PDNA (Post Disaster Need Assessment) dibagi 2 :

1. DaLa (Damaged and Loss Assessment).
   : Asesmen kerusakan atau kerugian fisik. (pemerintah).

2. HRNA (Human Recovery Need Assessment).
   = Asesmen kebutuhan pasca bencana (NGO & Pemerintah).

Setelah PDNA ~~[illegible]~~ (Jitupasna) menghasilkan RAN/D (Rencana Aksi Nasional / Daerah) untuk asesmen tahap Rekontruksi dan Rekonstruksi.

No
Date

* Berbagai Pandangan thd Bencana.

• Pandangan konvensional.
- Bencana adlh taudir yang tdk dapat diprediksi, dihindarkan dan dikendalikan.
- Masyarakat dianggap sbg korban dan penerima bantuan dr pihak luar.

• Pandangan IPA
- Bencana sbg unsur lingkungan Fisik yang membahayakan lingkungan, disebab oleh geofisik, geologi dan hidrometeorologi dan tidak dapat diperhitungkan Manusia
- ~~Bera~~ Bencana disebabkan alamiah, manusia tdk termasuk sbg penyabab bencana.

• Pandangan Progresif
- Bencana sbg bagian yg biasa dalam pembangunan.
- contoh Banjir yg disebabkan oleh sanitasi yg buruk atau Bangunan yang dibangun tanpa memperhatikan Amdal dan amdasnya.
- Jadi utk meminimalisir bencana perlu memperhatikan dampak dari adanya pembangunan.
- Peran pemerintah dan masyarakat sbg pengendali bencana itu sendiri.

• Pandangan Ilmu Sosial
- Fokus pada tanggapan akan kesiapan masyarakat menghadapi bencana
- Besarnya dampak bencana tergantung pd kerentanan masyarakat menghadapi bahaya atau bencana.

• Pandangan Holistik.
- Menekankan pada bahaya dan kerentanan serta kemampuan masyarakat.
- Bahaya jd bencana jika bertemu kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat.
- Salah satu cara ~~utu~~ utk mencegah kerentanan adalah dengan cara "Risk transfer" ~~f~~ tranfer resiko dengan jaminan asuransi. (thnya Asuransi Pertanian.

JOYKO® 36 Lines, 6 mm

Lampiran 6

Data pekerjaaan masyarakat Kelurahan Rancanumpamg

Jenis Matapencaharian	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%
1. Pegawai Negeri Sipil	305	6,66	305	6,66
2. TNI/POLRI	45	0,98	45	0,98
3. Pegawai Swasta	1277	27,90	1277	27,91
4. Tani	121	2,64	121	2,64
5. Dagang	182	3,97	182	3,97
6. Pelajar	1264	27,61	1262	27,58
7. Mahasiswa	148	3,23	148	3,23
8. Pensiunan	115	2,51	115	2,51
9. Pertukangan, Buruh, Kuli, dan lainnya	1120	24,47	1120	24,48
J u m l a h	**4.577**	**100.00**	**4.575**	**100,00**

Sumber : Profil Kelurahan Rancanumpang Tahun 2021

Lampiran 7

Data Penyandang Disabilitas Kelurahan Rancanumpang

DAFTAR PENYANDANG DISABILITAS
KECAMATAN GEDEBAGE KOTA BANDUNG

KELURAHAN RANCANUMPANG

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT DAN NO. TELP/HP	JENIS DISABILITAS
1	Haidar Al Barqi	Bandung 20-9-1996	L	Rancanumpang Rt.02/07	Cacat Gerak, Bicara,Tingkah Laku
2	Zain Hibatullah	Bandung 23-2-2002	P	Rancanumpang Rt.01/04	Gangguan Bicara /Autis
3	Ellys Hendriyani	Bandung 4-2-1958	P	Rancanumpang Rt.01/04	Gangguan Gerak/Tingkah Laku
4	Mario Septian	Palembang 10-9-1991	L	Rancanumpang Rt.01/04	Gangguan Gerak/Tingkah Laku
5	Anita	Bandung 1-9-1968	P	Rancanumpang Rt.02/04	Gangguan Tingkah Laku
6	Nendi	Bandung 16-7-1991	L	Rancanumpang Rt.02/01	Gangguan Perkembangan
7	E Sunjana	Bandung 29-6-1989	L	Rancanumpang Rt.02/01	Gangguan Gerak
8	Mari siti Mariam	Bandung 25-9-1945	P	Rt. 04/03 Kel. Rancanumpang	Gangguan Bicara /Pendengaran
9	Dedeh abdul Somad	Bandung 14-12-1961	L	GCA Rt. 01/04 Kel. Rancanumpang	Tuna Netra
10	Adah	Bandung 1967	P	Rancanumpang Rt. 05/01	Tingkahlaku
11	Anah	70 thn	P	Rancanumpang Rt. 04/01	Gangguan Gerak
12	Ipah	44 thn	P	Rancanumpang Rt. 01/01	Gangguan Gerak
13	Juhri	14+3-1956	L	Rancanumpang Rt. 02/01	Gangguan Pendengaran
14	Rukmi	60 thn	P	Rancanumpang Rt. 01/01	Gangguan Penglihatan
15	Mina	60 thn	P	Rancanumpang Rt. 05/01	Gangguan Penglihatan